Rencana Strategis



RANCANGAN AWAL RENSTRA 2025 - 2029

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Y.C. Oevang Oeray Sintang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Berkah dan rahmatnya penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembagunan Daerah yang mengamanatkan bahwa setiap institusi diwajibkan menyusun Rencana Strategis , yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Rencana Strategis memuat sasaran, arah kebijakan. Strategi, program dan kegiatan pembagunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan Dinas Perhubungan .

Demikian Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 ini dibuat sebagai panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan, dan kepada semua pihak yang telah turut berpartisipasi membantu pdenyelesaian penyusunan ini, diucapkan terima kasih.

Sintang, April 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SINTANG

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PERHUBUNGAN SINTANG

Ir. ELISA GULTOM, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661103 199503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN..... 7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan 7
2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan 15
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan 28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan 36

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 38
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan 38
3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 41
3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 44
3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis 47
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 50

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG 53
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan 53

BAB V STATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN 58
5.1. Strategi 58
5.2. Arah Kebijakan 59

BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 60

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG 72

BAB III PENUTUP 79

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 disusun Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 Rencana Strategis Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Rencana Strategis memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis, disamping berperan dalam mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Pembangunan transportasi pada hakekatnya untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional menuju terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan bidang transportasi menjadi bagian upaya mewujudkan Kabupaten Sintang yang maju, mandiri dan sejahtera. Sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang perhubungan, transportasi merupakan fokus perhatian utama dan harus dapat mengantisipasi berbagai masalah yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat akan transportasi maupun sarana dan prasarana penunjangnya. Dengan penyediaan sarana transportasi angkutan sudah barang tentu dapat

mewujudkan transportasi yang lancar, tertib, aman dan nyaman dengan memberikan pelayanan prima kepada publik, serta dapat menjangkau daerah pedalaman, guna menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Mengingat kondisi geografis daerah yang cukup berat mengakibatkan upaya menyediakan transportasi publik yang dapat memadai dan menjangkau seluruh daerah dan lapisan masyarakat masih belum dapat maksimal dilakukan.

Akses jalan belum dapat mencapai hingga ke seluruh kecamatan dan desa serta tidak terpeliharanya jalan menyebabkan angkutan sungai masih menjadi primadona masyarakat dalam bertransportasi.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 dilandasi dengan perundang-undangan dan Peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomo2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republim Indonesia tahun 2018 Nomor 2);
4. Perratruran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangjka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026.
12. Peraturan Bupati Sintang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 138 Tahun 2021 Tentang Sususnan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yaitu untuk memberikan arah pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang melalui rumusan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang terarah, efektif, efisien, dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Sintang Tahun 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 adalah:

- ✓ Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil Bupati Sintang sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
- ✓ Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang;
- ✓ Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja;

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perhubungan , Fungsi Renstra Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah , proses penyusunan Renstra Dishub, keterkaitan Renstra Dishub dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Dinas Perhubungan.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2025-2029 sebagai dasar penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang. Menjadikan gambaran kondisi umum Dinas Perhubungan saat ini dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan selama 5

(lima) tahun, serta pencapaian standar pelayanan minimal bagi Dinas Perhubungan yang mempunyai kewajiban SPM dan pencapaian pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang selama 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. Sistematika Renstra Dinas Perhubungan kabupaten sintang Tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang-kurangnya 8 (delapan) bab, yaitu :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 ini paling sedikit memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan serta Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Bab ini mengemukakan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, Sumber Daya Dinas Perhubungan , kinerja pelayanan Dinas

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dishub, Struktur organisasi serta uarain tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

2.2 Sumber Daya Dinas perhubungan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya .

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas perhubungan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Bab ini mengemukakan tentang permasalahan pelayanan Dinaas Perhubungan dan isu strategis .

3.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukaakn faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra inaas Perhubungn provinsi/Kabupaten/kota.

3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada Bab ini mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pdelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari gambaran pelayanan Dinas Oerhubungan, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menegah dari Renstra Dinas Perhubungan Provinsi/Kab/Kota, implikasi RTRW dan implikasi KLHS .

BAB IV TUJUN DAN SASARAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menegah Dinas Perhubungan beserta indicator kinerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mengemukkan rencana program dan kegiatan , indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah dibidang Perhubungan.

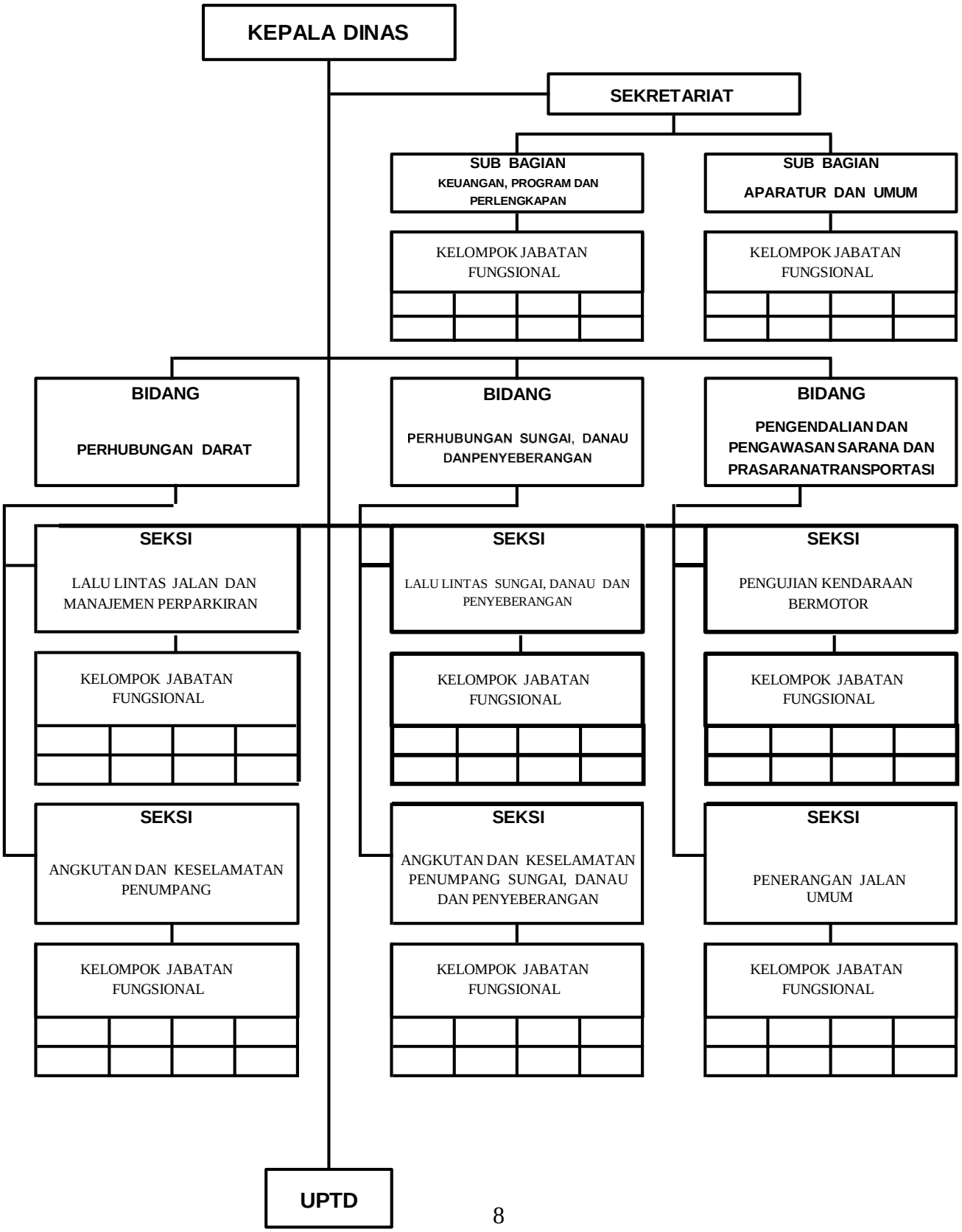
Dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 99 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 138 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, maka susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1) Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan; dan
2) Sub Bagian Aparatur dan Umum;
c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari:
1) Seksi Lalu Lintas Jalan dan Manajemen Perparkiran; dan
2) Seksi Angkutan dan Keselamatan Penumpang;
d. Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari:
1) Seksi Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
2) Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
e. BidangPengendaliandanPengawasan SaranadanPrasarana Transportasi, terdiri dari:
1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
2) Seksi Penerangan Jalan umum;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara jelas dapat dilihat pada struktur berikut :

(Berdasarkan PERBUB Nomor 99 Tahun 2024)

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang



Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 138 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah sesuai dengan bidang kewenangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pemimpin dan pengoordanisian bidang kesekretariatan, Bidang Perhubungan Darat, Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan, dan Bidang Pengendalian dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Transportasi;
b. penyusunan program kerja Dinas Perhubungan;
c. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Perhubungan;
d. perumusan penjabaran kebijakan dalam bidang Perhubungan;
e. pemberian pertimbangan teknis di bidang Perhubungan;
f. pembinaan UPTD di bidang Perhubungan;
g. penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;
h. penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibidang Perhubungan;
i. penyusunan perjanjian kinerja di bidang Perhubungan;
j. pelaksanaan sistem pengendalian internal;
k. penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
l. pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga di lingkungan Dinas Perhubungan;
m. pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf; dan
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang serta masing-masing Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas adalah membantu Kepala Dinas dalam bidang administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, perlengkapan kantor, arsip dan penyusunan rencana kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaiaan, keuangan, arsip dan barang;
b. Perlaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan di bidang Perhubungan;
c. Penhimpunan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
d. Perencanaan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuaan organisasi Dinas Perhubungan;
e. Penghimpuna, menyusun dan pengorganisasian program kerja dan laporan Dinas Perhubungan;
f. penelitian dan menelaah konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
g. pelaksanaan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan dan Sub Bagian Aparatur dan Umum;
h. pendistribusian dan mengoordinasikan tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para kepala bidang di Dinas Perhubungan;
i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ruang lingkup bidang kesekretariatan meliputi keuangan, program, perlengkapan, aparatur dan umum.

2. Bidang Perhubungan Darat

Kepala Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas di bidang Perhubungan Darat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja tahunan Bidang Perhubungan Darat;
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan bidang Perhubungan Darat;
c. Penghimpunan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
d. Penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasian program kerja dan laporan Bidang Perhubungan Darat;
e. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perhubungan darat;
f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada seksi-seksi dibidang perhubungan darat;
g. Pendistribusian dan mengoodinasikan tugas dari Kepala Dinas kepada para kepala seksi;
h. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis lalu lintas, perpakiran, terminal, angkutan orang dan barang di jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
i. Perumusan kebijakan teknis penetapan tarif di bidang perhubungan darat sesuai ketentuan yang berlaku;
j. Pelaksanaan penerimaan pendapatan daerah di bidang perhubungan darat sesuai perundang-undangan;
k. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program peningkatan lalu lintas jalan dan angkutan serta teknik sarana dan prasarana jalan;
l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi;
m. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, perizinan, pedoman dan petunjuk operasional di bidang perhubungan darat;

n. Perencanaan dan analisis kebutuhan halte, rambu-rambu lalu lintas jalan, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan serta fasilitas terminal sesuai dengan kewenangan;
o. Penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan fasilitasi di bidang perhubungan darat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
p. Penyelenggaraan pengawasan dan perizinan angkutan orang dan barang di jalan serta terminal;
q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya;
r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Ruang lingkup bidang perhubungan darat meliputi pengaturan perparkiran, lalu lintas jalan, angkutan jalan dan operasional terminal.

3. Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Kepala Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian di bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
b. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
c. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
d. penghimpun peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
e. penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
f. penghimpunan, menyusun dan mengkoordinasikan program kerja dan laporan bidang Perhubungan Sungai, Danau dan

Penyeberangan;

g. perumusan kebijakan penetapan tarif retribusi/pendapatan daerah di bidang tugasnya;
h. perumusan penerimaan pendapatan daerah di bidang perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan sesuai peraturan perundang- undangan;
i. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada seksi-seksi di bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
j. pengawasan, perizinan di bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
k. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
l. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ruang lingkup bidang perhubungan sungai, fdanau dan penyeberangan meliputi lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, angkutan sungai danau dan penyeberangan dan operasional Dermaga.

4. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Transportasi.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Transportasi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor serta penerangan jalan umum.

Bidang Pengendalian dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Transportasi mempunyai fungsi;

a. penyusunanProgram kerja tahunan Bidang Pengawasan Sarana dan Prasarana Transportasi;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan Bidang Pengawasan Sarana dan Prasarana Transportasi;
c. penghimpunan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
d. penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasian program kerja

dan laporan di Pengawasan Sarana dan Prasarana Transportasi;

e. penyiapan bahan administrasi dan teknis perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Pengawasan Sarana dan Prasarana Transportasi meliputi penerangan jalan umum dan pengujian kendaraan bermotor;
f. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengujian kendaraan;
g. penyelenggaraanperencanaan, pengawasan,pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengujian kendaraan dan penerangan jalan umum;
h. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
i. pelaksanaan pengendalian, pemeliharaan pengawasan, sarana dan prasarana Transportasi;
j. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana Transportasi;
k. penyusunan norma, pedoman, Standar dan kriteria pemberian perizinan dibidang tugasnya;
l. penyusunan rencana kebutuhan Penerangan Jalan Umum;
m. pelaksanaan proses pemberian izin alat tambahan dan atau Modifikasi kendaraan bermotor;
n. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dibidang tugasnya;
o. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi;
p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; dan;
q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ruang lingkup bidang perhubungan sarana dan prasarana meliputi sarana dan prasarana perhubungan, pengujian kendaraan bermotor dan penerangan jalan umum.

2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan sumber daya yang memadai , agar terlaksana dengan cepat, tepat, transparan dan akuntabel, sehingga berdampak kepada kinerja suatu instansi tersebut.

Adapun sumber daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Honorer yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kedudukan jabatan masing-masing mulai dari Pejabat Struktural, Penjabat Fungsional dan Staf.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang sampai Tahun 2025 didukung oleh 50 orang Pegawai Negeri Sipil , 1 Orang PPPK dan 26 orang tenaga honorer sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Data PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SD	-	-	0
2.	SMTP	-	-	0
3.	SMTA	15	1	16
4.	D I/II/III	10	4	14
5.	D IV/S1	11	5	16
6.	S2	5	0	5
	Jumlah	***41***	***10***	***51***

Tabel 2.2
Data PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang
Berdasarkan Golongan dan Jenis kelamin

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	I	0	-	0
2.	II	14	4	18
3.	III	23	6	29
4.	IV	4	0	4
	Jumlah	***41***	***10***	***51***

Tabel 2.3
Data PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang
Berdasarkan Eselon dan Jenis kelamin

No.	Esselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	II.b	1	-	1
2.	III.a	1	-	1
3.	III.b	2	-	2
4.	IV.a	8	1	9
	Jumlah	***12***	***1***	***13***

Tabel 2.4
Data PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang
Berdasarkan Diklatpim Yang Diikuti

NO.	NAMA	JABATAN	DIKLATPIM YANG SUDAH DIIKUTI		
			TINGKAT IV	TINGKAT III	TINGKAT II
1.	Ir. Elisa Gultom, M.Si	Kepala Dinas	√	√	√
2.	AM. Firwan Harisandy, SP	Sekretaris	√	-	-
4.	Rizal Novendry, A.Md LLAJ	Kabid Perhubungan Darat	√	-	-
5.	Zulfian, S.Ag, M.Si	Kabid Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan	√	-	-
6.		Kabid Perhubungan Sarana dan Prasarana	-	-	-
7.	Rusmin Esmardi	Analis Kebijakan Ahli Muda	-	-	-
8.	Edi Paryanto, S.Sos	Kasi Lalu Lintas jalan	√	-	-
9.	Riduansyah, S.Sos	Kasi Angkutan Jalan	-	-	-
10.	Abibon Yub, A.Ma. PKB	Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-
11.	Catur Joko Susanto, S.E.	Kasi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	√	-	-
12.	Adrianus Endra Damiyana, ST	Kasi Sarana dan Prasarana Perhubungan	-	-	-
13.	Sri Purawati, SE	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	√	-	-
14.	Fransiskus Edward, S.Sos, M.A.P	Kasubbag Aparatur dan Umum	-	-	-
15.	Ferry Kurniady, S.Sois, M.Ap	Kasi Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan	-	-	-

2.2.2. Aset/Modal

Dalam pelaksanaan tugas diperlukan sarana dan prasarana penunjang yang memadai agar proses pencapaian tujuan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang tidak menjadi alasan tidak terlaksananya tugas pokok dan fungsi yang dibebankan. Namun sebaliknya, harus berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan dan secara terus menerus berupaya meningkatkan kekurangan tersebut.Salah satu misi Dinas Perhubungan adalah menerapkan Standar Pelayanan Minimal dalam setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Setiap hal yang dilaksanakan harus dapat menyentuh kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pelayanan maksimal dibidang transportasi adalah suatu keharusan yang perlu dijawab oleh Dinas Perhubungan sebagai sebuah tantangan.

Meningkatkan kualitas pembangunan prasarana, fasilitas dan perizinan dibidang perhubungan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan potensi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan, meningkatnya pelayanan angkutan kepada masyarakat luas, penyediaan sarana dan prasarana di bidang perhubungan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana pendukung transportasi, serta mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya dengan peningkatan disiplin dan ketertiban pengguna jalan serta pengamanan lalu lintas merupakan bentuk pelayanan yang akan dilakukan secara kontinue dan dievaluasi secara berkala. Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Perhubungan diantaranya meliputi :

1. Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian kendaraan bermotor disebut juga uji kir adalah serangkaian tes untuk mengukur apakah sebuah kendaraan masih layak jalan atau tidak . Uji KIR wajivb bagi kendaraan niaga, baik itu digunakan untuk mengangkut penumpang mauopun barang.. Melakukan Uji KIR adalah wajib hukumnya bagi beberapa jenis kendaraan bermotor antara lain : Dump Truck, Truck Tangki, Double Cabin, Pick Up, Bus, Taksi, Angkutan Kota, Travel (Khusus yang berttrayek) dan kendaraan khusus (dengan tambahan kereta gandeng atau temple).

Pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor di Unit PKB dan pemeriksaan dilakukan oleh Penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji.

Kabupaten Sintang memiliki 1 (satu) unit Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor yang terletak di Jalan Sintang-Pontianak KM.13 dan telah beroperasi sejak tahun 2012. Pengujian dilaksanakan secara manual dan mekanis. Terdapat 3 buah mesin pengujian kendaraan yang merupakan bantuan Kementerian Perhubungan RI. Adapun kendaraan yang diuji kir selama periode 2022-2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6
Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Tahun 2020-2024

No	Jenis Kendaraan	Jumlah				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1.	Angkutan Umum	237	237	20	237	7
2.	Mobil Bus	147	147	7	148	5
3.	Mobil Pick Up	3109	3091	3077	3196	3244
4.	Truck	1943	1884	1867	1982	1860
5.	BT.Wagon	48	45	45	50	50
6.	Truk Tangki	85	83	83	97	52
	Total ……..	**5569**	**5487**	**5099**	**5170**	**5128**

Banyaknya kendaraan yang lulus uji sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7
Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji Tahun 2022-2024

No	Jenis Kendaraan	Jumlah				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1.	Angkutan Umum	6	4	-	2	-
2.	Mobil Bus	4	5	-	2	10
3.	Mobil Pick Up	1305	104	93	401	826
4.	Truck	1002	93	84	135	570
5.	BT.Wagon	42	27	3	38	128
6.	Truk Tangki	75	32	2	10	106
	Total ……..	**2434**	**265**	**182**	**588**	**1640**

Terkait dengan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM.71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor bahwa uji

berkala perpanjangan kendaraan bermotor dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.

Pelaksanaan kegiatan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tanpa dipungut biaya .

2. Pelayanan Pelabuhan Sungai/Bandar Udara/Terminal

Dermaga adalah tempat kapal bertambat dan dermaga juga digunakan berbagai kegiatan bongkar muat barang dan orang dari dan ke atas kapal. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Dermaga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelabuhan.

Bandar udara atau bandara merupakan sebuah fasilitas tempat pesawat terbang dapat lepas landas dan mendarat. Bandar udara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah landas pacu namun bandara-bandara besar biasanya dilengkapi berbagai fasilitas lain, baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi penggunanya. Menurut Annex 14 dari ICAO *(International Civil Aviation Organization)*: Bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan (termasuk bangunan, instalasi dan peralatan) yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat. Sedangkan definisi bandar udara menurut PT (Persero) Angkasa Pura adalah "lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat".

Terminal bus adalah merupakan sarana dan prasarana transportasi untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Terminal penumpang dapat dikelompokan atas dasar tingkat penggunaan terminal kedalam 3 (tiga) tipe sebagai berikut:

a. Terminal penumpang tipe A

   Terminal tipe A atau terminal induk berfungsi melayani kendaraan umum, baik secara nasional maupun internasional seperti angkutan antar

kota antar provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.

b. Terminal penumpang tipe B

Terminal tipe B atau terminal regional berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.

c. Terminal penumpang tipe C

Terminal tipe C atau subterminal berfungsi melayani kendaraan umum kelas kecil seperti angkutan kota dan angkutan pedesaan.

Di Kabupaten Sintang terdapat 2 (dua) buah pelabuhan sungai yaitu Pelabuhan Sungai Durian dan Pelabuhan Sungai Ringin, 1 (satu) buah pelabuhan/bandar udara yaitu Bandar Udara Sungai Tebelian dan 5 (lima) buah terminal yaitu terminal Sungai Durian, terminal Sungai Ukoi, terminal Tanjung puri, terminal Sepauk dan terminal Nanga Mau mulai tahun 2019 yang masih beroperasi hanya 3 (tiga) teminal yaitu Terminal Nanga Mau, Terminal Tanjung Puri dan Terminal Sungai Durian .

Tabel 2.9
Jumlah Pelabuhan Sungai/Pelabuhan Udara/Terminal
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelabuhan Sungai	2	2	2	2	2
2.	Dermaga	11	11	11	11	11
2.	Pelabuhan Udara	1	1	1	1	1
3.	Terminal	3	3	3	3	3

Dalam pelaksanaannya, pelabuhan sungai, bandar udara dan terminal melayani arus orang mau pun barang yang tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2.10
Jumlah Arus Penumpang Umum
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penumpang Angkutan Umum	56.956	72.554	100.549	47.092	59.399

Arus penumpang angkutan umum terkadang naik terkadang turun setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh meningkatnya kepemilikan kendaraan

pribadi, kerusakan jalan yang semakin meningkat dan pengaruh cuaca yaitu seringnya terjadi banjir pada jalan-jalan yang dilalui oleh masyarakat, di tahun 2024 arus penumpang cenderung meningkat hal ini dikarenakan perekonomian masyarakat yang berkembang mendorong mobilitas yang lebih tinggi, baik untuk pekerjaan , pendidikan maupun aktivitas lainnya sehingga meningkatnya kebutuhan akan angkutan umum.

Untuk melayani masyarakat dalam hal penyediaan angkutan umum, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk menyediakan kendaraan angkutan umum namun harus memiliki ijin trayek dari pemerintah. Berikut trayek angkutan darat yang ada di Kabupaten Sintang sebagai berikut :

Data Trayek Angkutan Umum Dalam Kota

NO.	TRAYEK	UNIT	KAPASITAS	
			SEAT	JUMLAH
1.	Terminal Sungai Durian – Tanjung Puri	22	9	198
2.	Terminal Sungai Durian – Baning	10	9	90
3.	Terminal Sungai Durian – Sei Putih	4	9	36
4.	Terminal Tj. Puri – Sei Durian	4	9	36
5.	Terminal Tj. Puri – Baning	12	9	108
6.	Terminal Tj. Puri – Jerora	5	9	45
7.	Terminal Tj. Puri – KP. Ladang	4	9	36
8.	Terminal Tj. Puri – Menyurai	4	9	36
9.	Terminal Tj. Puri – Sesar	3	9	27
10.	Terminal Tj. Puri – Museum	1	9	9
11.	Terminal Tj. Puri – Sei Kawat	1	9	9
	Jumlah ……	70	99	630

Data Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)

NO.	TRAYEK	UNIT	KAPASITAS	
			SEAT	JUMLAH
1.	Sintang – Pontianak	4	40	160
	Prim 642 Kapuas	3	40	120
	CV. Aryo			
2.	Sintang – Putussibau	2	25	50
	CV. Indah Utama			
3.	Sintang – Nanga Pinoh	4	16	64
	PT. Duta			
4.	Sintang - Bongkong	2	16	32
	CV. Indah Utama			
5.	Sintang - Jongkong	2	25	50
	CV. Asri			
6.	Sintang – Suhaid	4	16	64
	CV. Indah Utama			
	Jumlah …….	21	178	540

Data Trayek Angkutan Umum Pedesaan
Di Terminal Sungai Durian

NO.	TRAYEK	UNIT	KAPASITAS	
			SEAT	JUMLAH
1.	Terminal Sungai Durian – Sungai Ukoi	21	9	189
2.	Terminal Sungai Durian –Pandan	19	9	171
3.	Terminal Sungai Durian – Dedai	11	9	99
4.	Terminal Sungai Durian – SKPI	17	9	153
5.	Terminal Sungai Durian – Beloyang	4	9	36
6.	Terminal Sungai Durian – Baya Betung	1	9	9
7.	Terminal Sungai Durian – Gurung	2	9	18
8.	Terminal Sungai Durian – Bancoh	2	9	18
9.	Terminal Sungai Durian – Laman Bukit	3	9	27
10.	Terminal Sungai Durian – Kajang	2	9	18
11.	Terminal Sungai Durian – Gurung Mali	2	9	18
12.	Terminal Sungai Durian – Sei Kura	7	9	63
13.	Terminal Sungai Durian – Tempunak	9	9	81
14.	Terminal Sungai Durian – SKPC/Paoh	13	9	117
15.	Terminal Sungai Durian – Sepauk	12	9	108
16.	Terminal Sungai Durian – SKPH	8	9	72
17.	Terminal Sungai Durian – Sei Ayak	2	9	18
18.	Terminal Sungai Durian – Mansik	4	9	36
19.	Terminal Sungai Durian – Mensiku	5	9	45
20.	Terminal Sungai Durian – Telaga	8	9	72
21.	Terminal Sungai Durian – Kelansam	7	9	63
22.	Terminal Sungai Durian – Baung	5	9	45
23.	Terminal Sungai Durian – Sejirak	1	9	9
24.	Terminal Sungai Durian – Tumbuk	1	9	9
25.	Terminal Sungai Durian –Pedadang	2	9	18
26.	Terminal Sungai Durian –Semubuk	1	9	9
27.	Terminal Sungai Durian – Serangas	3	9	27
28.	Terminal Sungai Durian – Segantong	1	9	9
29.	Terminal Sungai Durian – Mangkok Terminal	1	9	9
30.	Sungai Durian – Balai Sepuak	1	9	9
31.	Terminal Sungai Durian –Gandis hilir	1	9	9
32.	Terminal Sungai Durian – Kederas	1	9	9

Data Trayek Angkutan Umum Pedesaan
Di Terminal Tanjung Puri

NO.	TRAYEK	UNIT	KAPASITAS	
			SEAT	JUMLAH
1.	Terminal Tanjung Puri – Sei Ukoi	4	9	36
2.	Terminal Tanjung Puri – L. Kelam	7	9	63
3.	Terminal Tanjung Puri – Empaci	5	9	45
4.	Terminal Tanjung Puri – SKP.G 123	6	9	54
5.	Terminal Tanjung Puri – SKP 456	3	9	27
6.	Terminal Tanjung Puri – Jetak	7	9	63
7.	Terminal Tanjung Puri – Pengkadan	3	9	27
8.	Terminal Tanjung Puri – Dedai	4	9	36
9.	Terminal Tanjung Puri – BLH. Merindu	6	9	54
10.	Terminal Tanjung Puri – Baras Umin	6	9	54
11.	Terminal Tanjung Puri – Gandis	3	9	27
12.	Terminal Tanjung Puri – SP.7.8 Bengkuang	3	9	27
	Terminal Tanjung Puri – Na. Tikan			
13.	Terminal Tanjung Puri – Melingkat	5	9	45
14.	Terminal Tanjung Puri – Linggam Ipoh	3	9	27
15.	Terminal Tanjung Puri – Tugug	1	9	9
16.	Terminal Tanjung Puri – Na. Mau	1	9	9
17.	Terminal Tanjung Puri – Na. Tebidah	6	15	96
18.	Terminal Tanjung Puri – SP. Silat	5	25	125
19.		4	9	36

Data Trayek Angkutan Umum Jalur Kabupaten Sintang –Kecamatan

NO.	TRAYEK	UNIT	KAPASITAS	
			SEAT	JUMLAH
1.	Sintang - Serawai	5	25	125
2.	Sintang – Na. Ketungau	0	25	0
3.	Sintang – Merakai	3	25	75
4.	Sintang - Senaning	1	25	25

Data Trayek (Taxi Bandara) Di Sintang

NO.	TRAYEK	UNIT	KAPASITAS	
			SEAT	JUMLAH
1.	Taxi	15	7	105
	Jumlah ……	15	7	105

Dari 73 Trayek yang ada diKabupaten Sintang yang masih aktif sampai dengan tahun 2024 hanya ada 17 trayek.

Berikut Data trayek yang masih aktif

No	Trayek	Keterangan
1.	Sintang – Pontianak	AKDP
2.	Sintang – Singkawang	AKDP
3.	Sintang – Kartiyasa	AKDP
4.	Sintang – Bengkayang	AKDP
5.	Sintang – Entikong	AKDP
6.	Sintang – Putusibau	AKDP
7.	Sintang – Jongkong	AKDP
8.	Sintang – Simpang Silat	AKDP
9.	Sintang – Nanga Mau – Tebidah	Perintis
10.	Sintang – Tempunak	Perintis
11.	Sintang – Sepauk	Pedesaan
12.	Sintang – SKPI-SPG	Pedesaan
13.	Sintang – Serawai	Pedesaan
14.	Sintang – SKPD-SP1	Pedesaan
15.	Sintang – Sungai Ukoi	Pedesaan
16.	Sintang – SKPC	Pedesaan
17.	Sintang - Bandara	Taxi

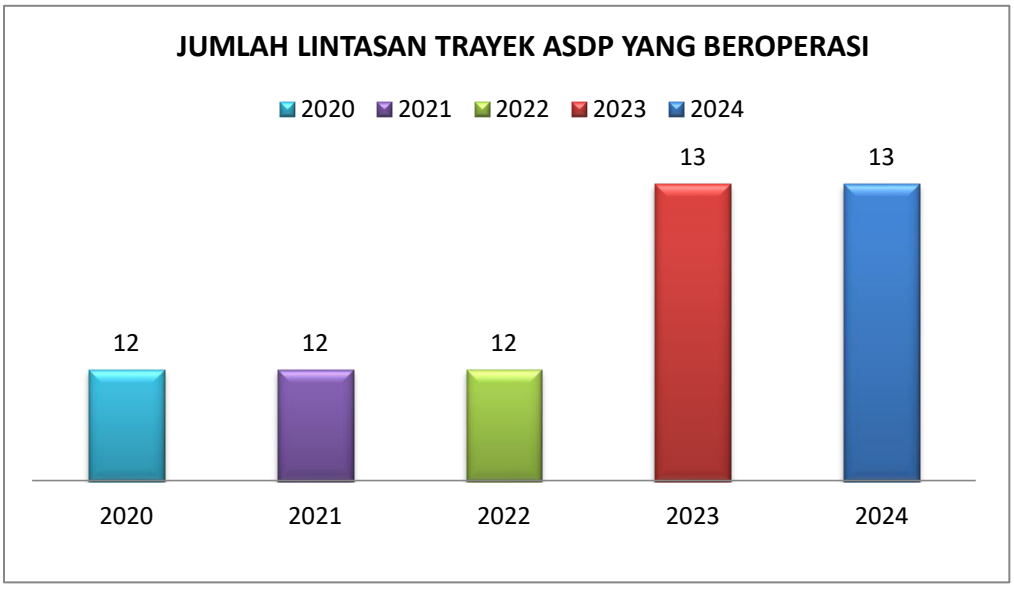
Sedangkan Untuk data Trayek angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan adalah sebagai berikut :

Data Trayek /lintasan angkutan umum sungai, danau dan penyeberangan Di Tahun 2024

NO.	JENIS ANGKUTAN	JARINGAN TRAYEK	KETERANGAN
1.	Motor Klotok Angkutan Penumpang GT-7	Sintang – Sepauk (PP)	Tidak Aktif (Belum Tersedia kapal)
		Sintang – Tempunak (PP)	Tidak Aktif (Belum Tersedia kapal)
		Sintang – Tanjung Prada (PP)	Aktif (Belum Tersedia kapal)
		Sintang – Kelansam (PP)	Aktif (3 kapal yang beroperasi)
		Sintang – Simba (PP)	Tidak Aktif (Belum Tersedia kapal)
		Sintang – Lebang (PP)	Aktif (2 kapal yang beroperasi)
		Sintang – Nanga Ketungau (PP)	Aktif (2 Kapal yang beroperasi)
		Sintang – Merakai (PP)	Tidak Aktif (Belum Tersedia kapal)
		Sintang – Senaning (PP)	Aktif (1 kapal yang beroperasi)
		Sintang - Jetak (PP)	Tidak Aktif (Belum Tersedia kapal)
		Sintang – Dedai (PP)	Tidak Aktif (Belum Tersedia kapal)
		Sintang – Gandis (PP)	Tidak Aktif (Belum Tersedia kapal)
2.	Speed Boat Angkutan Penumpang	Sintang – Senaning (PP)	Tidak Aktif (Belum Tersedia kapal)
		Sintang – Merakai (PP)	Aktif (18 kapal yang beroperasi)
		Sintang – Nanga Ketungau (PP)	Aktif (6 kapal yang beroperasi)
		Sintang – Lebang (PP)	Aktif (5 kapalyang beroperasi)
		Sintang – Serawai (PP)	Aktif (kapal tersedia)
		Sintang – Ambalau (PP)	Aktif (kapal tersedia)
3.	Sampan Tempel Bermotor Angkutan Penyeberangan	Sungai Durian – Musium (PP)	Aktif (11 kapal yang beroperasi)
		Sungai Durian – Pasar Inpres (PP)	Aktif (7 kapal yang beroperasi)
		Pasar Inpres – Menyumbung (PP)	Aktif (2 kapal yang beroperasi)
		Sepauk – Belitang (PP)	Aktif (16 kapal yang beroperasi)
		Senangan kecil-wirayuda (PP)	Aktif (9 kapal yang beroperasi)

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2024 Untuk trayek /lintasan angkutan umum sungai, danau dan penyeberangan ada sebanyak 23 jaringan trayek/lintasan , masih sama seperti tahun 2023 dari 23 lintasan trayek yang ada, hanya sebanyak 13 trayek/lintasan yang aktif.

Jumlah lintasan trayek yang memilik izin trayek angkutan sungai dan danau untuk 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :.



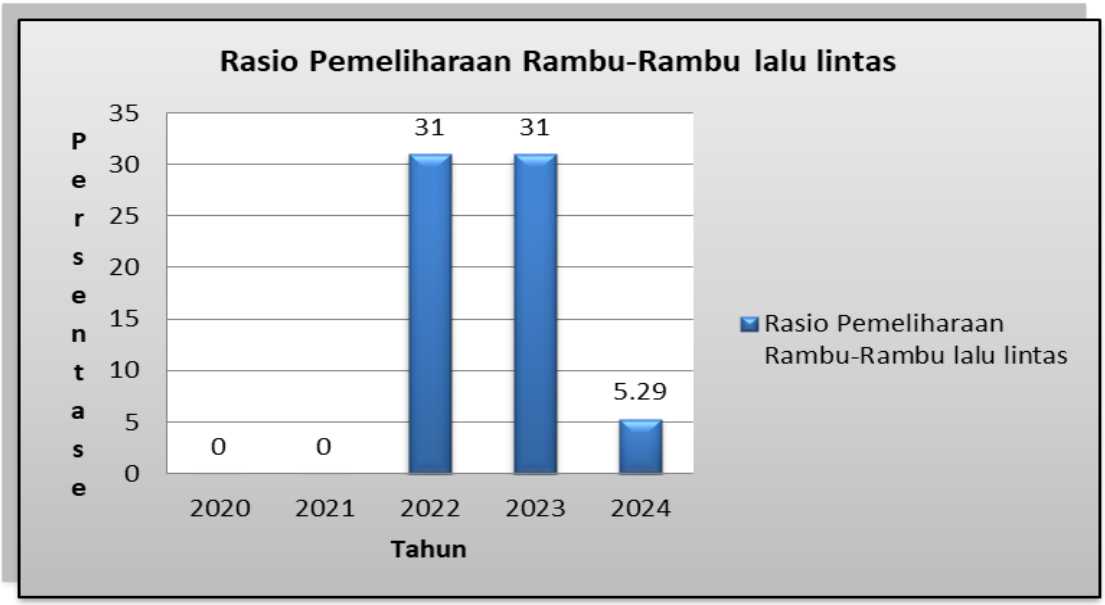
Jika dilihat dari data perbandingan diatas, untuk Lintasan Trayek angkutan Umum sungai, danau dan penyeberangan pada tahun 2024 masih sama seperti tahun 2023 belum ada penambahan lintasan trayek.

2. Keselamatan Lalu Lintas

Dalam rangka menciptakan keselamatan lalu lintas, Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kegiatan Pemeliharaan ini melalui Dana Alokasi Umum . Adapun lokasi Trafficc Light yang dipelihara adalah sebagai berikut :

No.	Lokasi	No Meteran
1.	Simpang Lima	14444696968
2.	Simpang Polres	14203941563
3.	Simpang Pertanian	14203941159
4.	Simpang Korem	56202125706

Berikut grafik Rasio perbandingan pemeliharaan rambu rambu lalu .lintas periode selama 5 (lima) tahun trakhir.



Selain itu upaya yang dilakukan untuk mengurangi keselamatan berlalu lintas, mengurangi kemacetan lalu lintas serta mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas, Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang selaku organisasi teknis yang membidangi urusan perhubungan melalui Bidang Perhubungan darat melakukan survey untuk megukur kecepatan rata-rata lalu lintas per Km/Jam dengan melakukan pengukuran jumlah Kendaraan yang melewati jalan di daerah tertentu dengan arus kendaraan yang bervariasi di saat jam-jam tertentu yang dinyatakan dalam per jam perkilometer, serta pengukuran LHR yaitu Pengukuran volume lalu lintas yang dua arah yang melalui suatu titik rata-rata dalam satu hari dan dihitung sepanjang tahun dengan cara melakukan survey pada ruas-ruas jalan yang menjadi jalan utama di Kabupaten Sintang . Berikut data ruas jalan jalan yang menjadi jalan jalan utama.

No.	Nama Ruas Jalan	Arah	Kecepatan Rata-rata
1.	Jl. PKP Mujahidin	Utara (SMA 1 Sintang)	28,96 Km/Jam
		Selatan (Simpang Polres)	28,55 Km/Jam
2.	Jl. Bhayangkara	Utara (Simpang Polres)	19,56 Km/Jam
		Selatan (Simpang 5)	18,73 Km/Jam
3.	Jl. Lintas Melawi	Barat (Jembatan Melawi)	19,54 Km/Jam
		Timur (Simpang 5)	19,46 Km/Jam
4.	Jl. M.T. Haryono	Utara (Tugu Bambu)	22,81 Km/Jam
		Selatan (Tugu Jam)	22,35 Km/Jam
5.	Jl. Y.C. Oenaang Oeray	Timur (Tugu Beji)	26,33 Km/Jam
		Barat (Simpang 5)	26,41 Km/Jam

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana

a. Transportasi Darat

Dalam rangka peningkatan keselamatan, pelayanan dan peningkatan kapasitas serta aksesibilitas transportasi darat telah dilakukan kegiatan Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan, rehabilitasi fasilitas terminal, pembangunan ATCS, dan pembangunan halte, pembangunan dan penataan tempat parkir serta peningkatan gedung Pengujian Kendaraan Bermotor.

Berikut Rincian pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat selama periode 2020-2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.13
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat
Tahun 2020-2024

No.	Kegiatan	Satuan	Pencapaian Pertahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pembangunan/Pemeliharaan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal	Unit	2				1
2.	Pemaliharaan rambu-rambu lalu lintas	Unit			140	4	4
3.	Pengadaan alat uji	Unit				1	1
4.	Pemeliharaan Alat Uji	jenis				1	10
3..	- Penataan Lokasi Parkir	Paket	1				
4.	Pembagunan Halte di depan SMP 1 Sepauk	Unit		1			

5.	Peningkatan halaman Parkir di pasar masuka dan rehab Drainase Pasar Masuka	Paket		2			
6.	Pemeliharaan halaman parkir Terminal Sungai Durian	Paket		1			

b. Transportasi Sungai

Pembangunan transportasi sungai selama tahun 2020-2024 dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi /pemeliharaan terminal/pelabuhan, pembangunan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pengadaan fasilitas kelengkapan dermaga/pelabuhan dan pengadaan rambu-rambu lalu lintas sebagaimana yang tampak pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai
Tahun 2016-2020

No.	Kegiatan	Satuan	Pencapaian Pertahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Sungai					
2.	Pembangunan/pemeliharaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan	Unit	4				
3.	Pengadaan rambu-rambu lalulintas	Unit	-				
4.	Pembangunan Dermaga di Desa Lunjang Tingang	Unit				1	
5.	Pengadaan Transportasi Air (Speed)			2	1	1	6
6.	Pembangunan tambatan perahu	Unit		5	2		
7.	Rehabilitasi Tambatan Perahu	Unit			2		
8.	Pembersihan alur sungai	Paket		2			

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Capaian Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perhubungan Periode sebelumnya menurut SPM dan indikator pelayanan dapat dilihat sebagai bagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkata Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada tahun Ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Darat		2.955.104 Orang		581.280	593.456	593.456	593.456	593.456	37.086	45.367	79.102	38.092	51.529	6.38	7.64	13.33	6.42	8.68
2	Jumlah arus penumpang Angkutan Umum sungai, Danau dan Penyeberangan		1.688.760 Orang		323.280	323.280	345.240	345.240	351.720	16.578	27.187	21.447	9.000	7.870	5.13	8.41	6.21	2.61	2.24
3	Jumlah armada Angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang beroperasi		1.127 Buah		199	232	232	232	232	185	188	188	124	124	92.96	81.03	81.03	53.45	53.45
4	Jumlah Angkutan Umum Darat yang beroperasi		1.848 Buah		368	370	370	370	370	32	23	49	36	36	8.70	6.22	13.24	9.73	9.73
5	Jumlah Trayek Angkutan Umum Darat yang masih aktif (beroperasi)		73 Trayek		73	73	73	73	73	17	17	17	17	17	23.29	23.29	23.29	23.29	23.29
6	Jumlah Lintasan Trayek Angkutan Umum Sungai danau dan penyeberangan yang beroperasi		27 Trayek		27	27	27	27	27	12	12	12	13	13	44.44	44.44	44.44	48.15	48.15
7	Jumlah Pelabuhan sungai/ Udara , Halte, dan Terminal Bis																		
	- Pelabuhan sungai		3 Unit		3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67
	- Pelabuhan Udara		1 Unit		2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	50	50	100	100	100
	- Teminal Bis		5 Unit		5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	60	60	60	60	60
8	Rasio Volume Kendaraan perluas jalan		50.000 Kendaraan		8.000	9.000	10.000	11.000	12.000	17.745	17.97	18.745	18.745	18.745	221.81	199.67	187.45	170.41	156.21
9	Jumlah Kendaraan wajib Uji		27.083 Kendaraan		5.569	5.487	5.099	5.710	5.218	2.434	265	182	588	164	43.71	44.36	3,57	10,30	3,14
10	Jumlah rambu-rambu yang terpelihara		150 Unit		0	0	150	150	150	19	23	140	280	4	-	-	93.33	186.67	2.67

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk pencapaian target setiap tahunnya mengalami Fluktuasi setiap tahunnya hal ini dikarenakan :

1. Untuk point nomor 1 sampai dengan 6 dikarenakan :
   - ✓ meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi, kerusakan jalan yang semakin meningkat dan pengaruh cuaca yaitu seringnya terjadi banjir pada jalan-jalan yang dilalui oleh masyarakat.
   - ✓ Meningkatnya penggunaan transportasi online (yang tidak memiliki izin, sehingga arus keluar masuk penumpang tidak tercatat dan tidak dapat terdeteksi hal ini bisa mengurangi jumlah pengguna angkutan umum.
   - ✓ Masyarakat sudah banyak yang menggunakan kendaraan pribadi , sebagai dampak dari hal tersebut mengakibatkan banyak kendaraan umum yang tidak beroperasi dikarenakan penumpang yang sudah tidak ada lagi.
   - ✓ Terkadang Perekonomian masyarakat yang berkembang mendorong mobilitas yang lebih tinggi, baik untuk pekerjaan, pendidikan, maupun aktivitas lainnya, sehingga meningkatkan kebutuhan akan angkutan umum.
   - ✓ Tingkat keterhubungan antar wilayah , daerah terpencil melalui tranportasi darat maupun sungai sudah bisa terjangkau, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
   - ✓ Meningkatnya infrastruktur dan layanan kepada masyarakat melalui transportasi darat maupun sungai.
2. Rasio volume kendaran perluas jalan meningkat setiap tahunnya hal ini dikarenakan :
   - ✓ Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan transportasi meningkat.
   - ✓ Banyak orang lebih memilih untuk berkendaraan pribadi.
   - ✓ Harga kendaraan yang semakin terjangkau mendorong lebih banyak orang untuk membeli mobil atau sepeda motor.
3. Menurunnya jumlah kendaraan wajib uji hal ini dikarenakan :
   - ✓ Banyak kendaraan yang sudah tidak laik operasi yang disebabkan oleh faktor usia kendaraan.
   - ✓ Banyak kendaraan yang tidak dapat dilayani Proses pengurusan pengujian kendaraan bermotor (KIR) dan UPKB Kabupaten Sintang karena :

- Belum tersedia fasilitas pengujian kendaraan bermotor sesuai standar dari Kementerian Perhubungan RI seperti sehingga banyak kendaraan yang tidak dapat melakukan pengujian atau lulus uji (KIR)
- Adanya perubahan dari sistem uji KIR manual (buku uji) ke system Uji KIR Elektronik melalui aplikasi RFID dan SIM PKB berbasis BLU-E (Bukti Lulus Uji Elektronik)

✓ Tidak adanya tindakan sanksi terhadap kendaraan yang tidak melakukan uji berkala dikarenakan tidak memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (PPNS Bidang LLAJ).

4. Pemilik kendaraan enggan untuk melakukan uji berkala kendaraan bermotor karena terbentur dengan peraturan dari Kementerian Perhubungan yang dirasa memberatkan pemilik kendaraan.

4. Jumlah rambu rambu yang terpelihara ditahun 2024 mengalami penurunan yang sangat drastis dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga lebih diprioritaskan untuk pemeliharaan traffic light, sementara untuk pemeliharaan rambu –rambu yang direncanakan untuk periode 5 tahun ditargetkan sebanyak 450 rambu telah terpelihara sebanyak 280 Rambu.

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

Kabupaten Sintang

Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata- Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Rp	*Rp*	*Rp*	*Rp*	*Rp*	*Rp*	*Rp*	*Rp*	*Rp*	*Rp*	%	%	%	%	%	*Rp*	%
Urusan Perhubungan																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**2,372,700.00**	**10,782,000.00**	**20,085,500.00**	**20,698,600.00**	**10,340,640.00**	**2,207,700.00**	**10,750,000.00**	**19,798,700.00**	**20,563,900.00**	**10,311,600.00**	**93.05**	**99.70**	**98.57**	**99.35**	**99.72**	**16,254,308.00**	**-60.86**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4,000,000.00		5,081,100.00	4,341,000.00		4,000,000.00		5,509,500.00	4,323,400.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	108.43	99.59	4,933,080.00	#DIV/0!
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,372,700.00	6,782,000.00		15,617,500.00	5,999,640.00	2,207,700.00	6,750,000.00		15,054,400.00	5,988,200.00	93.05	99.53	#DIV/0!	96.39	99.81	11,321,228.00	#DIV/0!
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**4,402,700.00**	**4,185,073,948.00**	**4,612,623,907.00**	**4,766,503,538.00**	**5,443,603,297.00**	**4,303,100.00**	**3,400,000.00**	**4,141,668,872.00**	**4,314,070,758.00**	**4,939,830,295.00**	**97.74**	**0.08**	**89.79**	**90.51**	**90.75**	**4,897,520,789.80**	**-34.68**
Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN		4,181,623,948.00		4,750,839,498.00	5,424,221,297.00				4,298,648,218.00	4,920,579,095.00						- 2,871,336,948.60	0.00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-		-	12,382,000.00	-	-		-	12,382,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	- 2,476,400.00	#DIV/0!
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,880,300.00	3,450,000.00		9,309,040.00	4,000,000.00	2,786,700.00	3,400,000.00		9,100,540.00	3,982,400.00	96.75	98.55	#DIV/0!	97.76	99.56	- 2,775,748.00	#DIV/0!
Penyusunan dan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,522,400.00			6,355,000.00	3,000,000.00	1,516,400.00	-		6,322,000.00	2,886,800.00	99.61	#DIV/0!	#DIV/0!	99.48	96.23	- 1,566,520.00	#DIV/0!
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**-**	**13,670,000.00**	**77,381,610.00**	**170,516,200.00**	**112,260,800.00**	**-**	**13,670,000.00**	**77,138,500.00**	**167,919,900.00**	**111,263,100.00**	**#DIV/0!**	**100.00**	**99.69**	**98.48**	**99.11**	**158,865,120.00**	**#DIV/0!**
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		-	-	89,400,700.00	112,260,800.00	-	-	-	88,084,500.00	111,263,100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98.53	99.11	- 40,332,300.00	#DIV/0!
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		13,670,000.00		81,115,500.00			13,670,000.00		79,835,400.00		#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	98.42	#DIV/0!	- 18,957,100.00	#DIV/0!
Adminstrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**-**	**33,952,755.00**	**75,000,000.00**	**46,182,514.00**	**14,656,500.00**			**-**			**#DIV/0!**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,877,311.20**	**#DIV/0!**
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		33,952,755.00		46,182,514.00	14,656,500.00		4,260,000.00		-		#DIV/0!	12.55	#DIV/0!	0.00	0.00	- 18,958,353.80	#DIV/0!
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**-**	**4,980,550.00**	**94,447,200.00**	**98,997,500.00**	**135,378,000.00**	**-**	**4,980,550.00**	**93,896,500.00**	**96,925,224.00**	**107,818,479.00**	**#DIV/0!**	**100.00**	**99.42**	**97.91**	**79.64**	**106,273,600.00**	**#DIV/0!**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut				62,437,500.00	36,000,000.00				62,437,500.00	35,550,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	98.75	- 19,687,500.00	#DIV/0!
Pendapatan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		4,980,550.00		35,000,000.00	30,000,000.00		4,980,550.00		34,487,724.00	28,643,200.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	98.54	95.48	- 13,996,110.00	#DIV/0!
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-		1,560,000.00	69,378,000.00		-	-	-	43,625,279.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	62.88	- 14,187,600.00	#DIV/0!
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		-		-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**370,061,200.00**	**206,373,882.00**	**319,736,494.00**	**313,407,836.00**	**405,246,214.00**	**367,614,909.00**	**206,373,882.00**	**306,348,347.00**	**301,667,075.00**	**398,275,495.00**	**99.34**	**100.00**	**95.81**	**96.25**	**98.28**	**- 38,285,688.40**	**-58.20**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,316,000.00	3,993,000.00		10,731,036.00	7,025,634.00	4,316,000.00	3,993,000.00		10,569,420.00	6,897,540.00	100.00	100.00	#DIV/0!	98.49	98.18	- 3,486,734.00	#DIV/0!
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,048,200.00	48,494,700.00		60,694,800.00	60,604,890.00	59,797,100.00	48,494,700.00		59,527,990.00	60,604,890.00	99.58	100.00	#DIV/0!	98.08	100.00	- 21,949,238.00	#DIV/0!
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,479,000.00	7,265,500.00		7,303,500.00	7,302,690.00	6,157,010.00	7,265,500.00		7,288,900.00	7,302,690.00	95.03	100.00	#DIV/0!	99.80	100.00	- 3,078,538.00	#DIV/0!
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37,633,000.00	49,896,188.00		42,882,000.00	44,987,400.00	37,632,699.00	49,896,188.00		37,785,000.00	40,479,750.00	100.00	100.00	#DIV/0!	88.11	89.98	- 20,026,517.60	#DIV/0!
Penyediaan Barang Cetakkan dan Pengadaan	28,465,000.00	34,715,494.00		14,185,800.00	14,185,800.00	28,431,250.00	34,715,494.00		11,396,925.00	13,986,000.00	99.88	100.00	#DIV/0!	80.34	98.59	- 6,924,418.80	#DIV/0!
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,380,000.00	2,010,000.00		-		4,366,000.00	2,010,000.00				99.68	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	474,000.00	#DIV/0!
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228,740,000.00	59,999,000.00		177,610,700.00	271,139,800.00	226,914,850.00	59,999,000.00		175,098,840.00	269,004,625.00	99.20	100.00	#DIV/0!	98.59	99.21	- 56,001,900.00	#DIV/0!
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**507,300,000.00**	**57,170,000.00**	**511,034,980.00**	**77,716,180.00**	**109,625,890.00**	**250,400,750.00**	**28,585,000.00**	**498,002,065.00**	**71,583,500.00**	**101,927,000.00**	**49.36**	**50.00**	**97.45**	**92.11**	**92.98**	**- 423,201,878.00**	**-56.64**
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	253,650,000.00	28,585,000.00									-	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	45,013,000.00	#DIV/0!
Pengadaan Mebel	7,900,000.00					7,091,400.00	-				89.76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,580,000.00	#DIV/0!

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,138,000.00	7,448,500.00		34,500,000.00	39,780,000.00	27,260,401.00	7,400,000.00		32,076,500.00	38,079,430.00	82.26	99.35	#DIV/0!	92.98	95.73	- 9,718,100.00	#DIV/0!
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33,138,000.00	13,720,000.00		60,760,000.00	59,960,000.00	27,260,401.00	13,000,000.00		51,127,450.00	50,844,890.00	82.26	94.75	#DIV/0!	84.15	84.80	- 20,260,400.00	#DIV/0!
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7,200,000.00	3,355,000.00		12,187,800.00	84,896,200.00	7,123,200.00	3,355,000.00		12,187,800.00	84,736,200.00	98.93	100.00	#DIV/0!	100.00	99.81	- 18,647,800.00	#DIV/0!
Pemeliharaan/Reahabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19,600,000.00	9,372,000.00		17,338,200.00	17,338,200.00	18,998,480.00	9,372,000.00		17,338,200.00	17,338,200.00	96.93	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00	- 4,889,680.00	#DIV/0!
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTANJALAN (LLAJ)																	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**100,000,000.00**	**-**	**170,508,000.00**	**92,000,000.00**	**66,000,000.00**	**99,192,000.00**	**-**	**166,285,500.00**	**90,513,500.00**	**65,160,000.00**	**99.19**	**#DIV/0!**	**97.52**	**98.38**	**98.73**	**- 13,200,000.00**	**#DIV/0!**
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100,000,000.00			92,000,000.00	66,000,000.00	99,192,000.00	-		90,513,500.00	65,160,000.00	99.19	#DIV/0!	#DIV/0!	98.38	98.73	- 11,600,000.00	#DIV/0!
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**367,848,400.00**	**174,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**367,105,000.00**	**172,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**99.80**	**98.85**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**- 367,848,400.00**	**#DIV/0!**
Pembangunan Gedung Terminal	367,848,400.00	174,000,000.00		-		367,105,000.00	172,000,000.00				99.80	98.85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	38,769,680.00	#DIV/0!
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**200,000,000.00**	**-**	**87,824,000.00**	**149,990,160.00**	**60,000,000.00**	**199,750,000.00**	**-**	**87,037,400.00**	**78,709,078.00**	**55,938,000.00**	**99.88**	**#DIV/0!**	**99.10**	**52.48**	**93.23**	**- 68,007,872.00**	**#DIV/0!**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	200,000,000.00			149,990,160.00	60,000,000.00	199,750,000.00			78,709,078.00	55,938,000.00	99.88	#DIV/0!	#DIV/0!	52.48	93.23	- 1,998,032.00	#DIV/0!
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**4,800,000.00**	**43,367,500.00**	**735,983,500.00**	**499,992,950.00**	**816,808,900.00**	**4,800,000.00**	**43,367,500.00**	**733,029,400.00**	**475,265,630.00**	**736,247,000.00**	**100.00**	**100.00**	**99.60**	**95.05**	**90.14**	**558,556,140.00**	**-56.96**
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				258,500,000.00	733,854,900.00				237,791,200.00	653,649,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	91.99	89.07	- 198,470,980.00	#DIV/0!
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4,800,000.00	43,367,500.00		241,492,950.00	82,954,000.00	4,800,000.00	43,367,500.00		237,474,430.00	82,598,000.00	100.00	100.00	#DIV/0!	98.34	99.57	- 72,602,890.00	#DIV/0!
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan yasa Lalu Lintas				-							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	**49,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48,587,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99.16**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**- 49,000,000.00**	**#DIV/0!**
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	49,000,000.00					48,587,000.00					99.16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	9,800,000.00	#DIV/0!
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**-**	**-**	**15,362,000.00**	**43,143,900.00**	**26,617,600.00**	**-**	**-**	**15,362,000.00**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**39,838,640.00**	**#DIV/0!**
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	-			43,143,900.00	26,617,600.00	-			41,347,580.00	24,382,200.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	95.84	91.60	- 13,952,300.00	#DIV/0!
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**92,513,200.00**	**16,540,000.00**	**101,712,200.00**	**132,245,720.00**	**47,819,320.00**	**91,756,200.00**	**16,540,000.00**	**88,122,900.00**	**123,393,090.00**	**44,692,320.00**	**99.18**	**100.00**	**86.64**	**93.31**	**93.46**	**22,847,240.00**	**-54.84**
Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	79,108,200.00	10,000,000.00		109,997,000.00	18,421,000.00	79,108,200.00	10,000,000.00		105,738,700.00	18,394,600.00	100.00	100.00	#DIV/0!	96.13	99.86	- 11,861,960.00	#DIV/0!

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**129,850,000.00**	**5,000,000.00**	**79,062,600.00**	**49,221,200.00**	**19,511,400.00**	**129,750,000.00**	**5,000,000.00**	**70,370,000.00**	**47,370,400.00**	**19,230,400.00**	**99.92**	**100.00**	**89.01**	**96.24**	**98.56**	**- 86,570,760.00**	**-56.78**
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	129,850,000.00	5,000,000.00		49,221,200.00	19,511,400.00	129,750,000.00	5,000,000.00		47,370,400.00	19,230,400.00	99.92	100.00	#DIV/0!	96.24	98.56	11,223,480.00	#DIV/0!
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN																	
Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	**72,815,000.00**	**11,070,000.00**	**54,677,500.00**	**48,205,000.00**	**35,000,000.00**	**72,740,000.00**	**11,070,000.00**	**54,547,500.00**	**46,899,618.00**	**30,562,700.00**	**99.90**	**100.00**	**99.76**	**97.29**	**87.32**	**- 27,251,000.00**	**-56.90**
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terinegrasi Secara Elektronik	25,030,000.00	5,570,000.00		48,205,000.00	20,000,000.00	24,985,000.00	5,570,000.00		46,899,618.00	16,792,600.00	99.82	100.00	#DIV/0!	97.29	83.96	- 9,749,000.00	#DIV/0!
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Kegiatan Pengawasan Terhadap Kelengkapan Dokumen dan Sarana Keselamatan Kapal Angkutan Sungai)	47,785,000.00	5,500,000.00			15,000,000.00	47,755,000.00	5,500,000.00			13,770,100.00	99.94	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	91.80	5,457,000.00	#DIV/0!
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	**20,000,000.00**	**1,895,000.00**	**21,335,700.00**	**64,605,900.00**	**55,000,000.00**	**19,900,000.00**	**1,895,000.00**	**19,960,700.00**	**61,283,900.00**	**50,357,100.00**	**99.50**	**100.00**	**93.56**	**94.86**	**91.56**	**42,684,720.00**	**-56.09**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan	20,000,000.00	1,895,000.00		64,605,900.00	55,000,000.00	19,900,000.00	1,895,000.00		61,283,900.00	50,357,100.00	99.50	100.00	#DIV/0!	94.86	91.56	- 20,300,180.00	#DIV/0!
Penetapan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoprasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	**30,010,000.00**	**1,500,000.00**	**32,525,000.00**	**71,950,576.00**	**30,000,000.00**	**25,249,100.00**	**1,500,000.00**	**30,790,000.00**	**65,448,060.00**	**28,695,600.00**	**84.14**	**100.00**	**94.67**	**90.96**	**95.65**	**33,550,460.80**	**-59.43**
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoprasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	30,010,000.00	1,500,000.00		71,950,576.00	30,000,000.00	25,249,100.00	1,500,000.00		65,448,060.00	28,695,600.00	84.14	100.00	#DIV/0!	90.96	95.65	- 14,688,115.20	#DIV/0!

Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	-	-	-						**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	-	**#DIV/0!**
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal							-										
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Sungai dan Danau	**796,075,000.00**	**739,130,000.00**	**330,700,000.00**	**81,709,900.00**	**259,998,000.00**	**790,689,900.00**	**737,000,000.00**	**329,044,000.00**	**80,980,160.00**	**257,676,050.00**	**99.32**	**99.71**	**99.50**	**99.11**	**99.11**	**- 678,707,480.00**	**-59.62**
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	596,075,000.00	739,130,000.00			200,000,000.00	592,933,900.00	737,000,000.00			197,731,000.00	99.47	99.71	#DIV/0!	#DIV/0!	98.87	- 68,611,000.00	#DIV/0!
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-		81,709,900.00	59,998,000.00	-	-	-	80,980,160.00	59,945,050.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99.11	99.91	- 28,341,580.00	#DIV/0!
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	200,000,000.00					197,756,000.00					98.88	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	40,000,000.00	#DIV/0!
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**120,547,100.00**	**25,610,000.00**	**-**	**-**	**-**												
Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	120,547,100.00	25,610,000.00				120,543,600.00	25,610,000.00				100.00	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	18,987,420.00	#DIV/0!
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
PROGRAM PENATAAN DESA																	
Penyelenggaraan Penataan Desa	**180,000,000.00**	**629,964,000.00**	**100,000,000.00**	**210,000,000.00**	**795,000,000.00**	**99,81%**	**628,000,000.00**	**99,950,000.00**	**206,922,800.00**	**786,463,000.00**	**99,81%**	**99.69**	**99.95**	**98.53**	**98.93**	**- 310,992,800.00**	**-79.22**
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	180,000,000.00	629,964,000.00	100,000,000.00	210,000,000.00	795,000,000.00	99,81%	628,000,000.00	99,950,000.00	206,922,800.00	786,463,000.00	**99,81%**	99.69	99.95	98.53	98.93	- 310,992,800.00	-79.22

Jika dilihat dari Tabel diatas bahwa rasio antara realisasi dan anggaran setiap tahunnya juga mengalami Fluktuasi setiap tahunnya hal ini dikarenakan adanya faktor Kebijakan Pemerintah diantaranya :

- Ditahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 adanya wabah Covid 19 sehingga ada Penundaan atau pemangkasan anggaran**.**
- Perubahan prioritas belanja**,** seperti pergeseran dari belanja modal ke belanja operasional.
- Reformasi birokrasi yang memperlambat penyerapan anggaran karena adanya prosedur baru.
- Proses pengadaan barang dan jasa yang lambat, misalnya akibat tender yang gagal atau revisi dokumen anggaran.
- Kurangnya kapasitas pelaksana proyek**,** terutama dalam proyek infrastruktur besar.
- Koordinasi antar kementerian/lembaga yang kurang efektif, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pencairan anggaran.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

a. Tantangan Pelayanan Perhubungan Kabupaten Sintang

1. Kabupaten Sintang merupakan daerah dengan kondisi geografis cukup berat, luas jangkauannya dan kondisi jalan dengan kondisi baik masih rendah dan sebagian besar permukaan berupa jalan tanah. Selain itu daya dukung jalan rendah dan rentang akses jalan darat yang masih pendek mengakibatkan pelayanan bidang perhubungan tidak maksimal.
2. Tingkat kecukupan sarana dan prasarana transportasi masih kurang dalam rangka menciptakan transportasi yang aman, lancar, murah dan murah.
3. Pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dianggap belum optimal disebabkan keterbatasan personil dan lebih pada aspek keterbatasan kapasitas sumber daya manusia.

   Apabila dilihat dari aspek penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi, saat ini masih tingginya tingkat toleransi aparatur dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

4. Berbagai kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam bidang perhubungan belum dapat dilaksanakan karena terbentur dasar hukum pelaksanaannya.
5. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM transportasi sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi.
6. Belum optimalnya pengelolaan potensi sehingga jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah kurang maksimal.

b. Peluang Pelayanan Perhubungan

1. Misi pemerintah daerah yang akan mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
2. Dukungan kebijakan ekonomi, politik, sosial dan keamanan dari Pemerintah Pusat dapat mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.
3. Akses ke daerah pelosok yang semakin terbuka dengan adanya kebijakan pimpinan daerah untuk membangun dari desa ke kota.
4. Adanya penetapan kawasan strategis kabupaten/kota yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.
5. Adanya potensi retribusi yang belum tergali dengan maksimal seperti kepelabuhanan, perparkiran.
6. Semakin berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi berdampak dengan semakin mudahnya untuk mengakses informasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah dibidang Perhubungan. Identifikasi permasalahan didasarkan Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	*2*	*3*	*4*
1.	- Tidak lengkapnya surat-surat administrasi kendaraan umum dan kendaraan barang	➢ Kurangnya sosialisasi kepada pemilik kendaraan umum. ➢ Kurangnya penindakan hukum ➢ Terbatasnya kewenangan Dinas Perhubungan	❖ Terbatasnya PPNS di di Dinas Perhubungant. ❖ Kurangnya keterlibatan instansi terkait ❖ Belum tersedia anggaran untuk sosialisasi.
2.	- Banyak angkutan umum yang tidak memiliki ijin trayek	➢ Kurangnya kesadaran pengenudi.	❖ SDM pengemudi kendaraan kurang memahami manfaat ijin trayek. ❖ Kurang pengawasan dan penindakan sanksi. ❖ Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan sosialisasi
3.	- Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas terutama pengemudi dibawah umur	➢ Kurangnya sosialisasi ke sekolah-sekolah	❖ Belum tersedia anggaran untuk sosialisasi.
4.	- Sering terjadi	➢ Tidak mematuhi rambu-	❖ Kurang Penindakan

	kecelakaan lalu lintas	rambu lalulintas. ➢ Kurangnya pemahaman pengemudi terhadap rambu lalu lintas. ➢ Banyak rambu lalu lintas yang rusak dan hilang.	sanksi yang tegas. ❖ Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan sosialisasi ❖ Tidak tersedianya anggaran untuk pengadaan rambu-rambu lalu lintas.
5.	Tatakelola pelabuhan sungai yang akuntable melalui peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas ASN di Bidang Perhubungan Sungai dan Danau.	➢ Indek profesionalitas ASN (struktural dan fungsional) yang masih rendah	❖ Prosentase ASN yang mengikuti Diklat teknis masih rendah.
6.	Tingkat pelayanan jasa kepelabuhanan masih sangat rendah.	➢ Masih rendahnya tingkat keselamatan transportasi sungai dan belum terlaksananya penyediaan infrastruktur dasar transportasi sungai yang berkualitas. ➢ Belum tersedianya dokumen DLKr/DLKp pelabuhan sungai durian dan pelabuhan sungai ringin.	❖ Tidak tersedia anggaran untuk pembuatan dokumen DLKr/DLKp pelabuhan serta peningkatan dan pengembangan infrastruktur di pelabuhan sungai durian dan pelabuhan sungai ringin.
7.	Pemilik / Operator kapal angkutan sungai dan danau wajib melengkapi surat kapal pada saat mengoperasikan kapal.	➢ Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menerbitkan dokumen kapal GT-7 kebawah, tersentralisasi ke Pemerintah Pusat melalui Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.	❖ Terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
8.	Target yang ditetapkan Pemerintah tidak dapat terpenuhi	➢ Kendaraan umum yang bertrayek keluar masuk terminal sudah sangat berkurang. ➢ Berkenaan diatas maraknya peralihan moda transportasi angkutan umum ke kendaraan angkutan pribadi.	❖ Insfrastruktur jalan yang tidak menunjang moda transportasi umum. ❖ Mudahnya mendapatkan kendaraan dikarenakan ringannya biaya angsuran kendaraan.

9.	Belum lengkapnya fasilitas di Pelabuhan/Dermaga Sungai Durian	➢ Kurangnya tempat tambat bagi kapal angkutan barang dan kapal angkutan ➢ Kurangnya tempat tambat bagi kapal angkutan barang dan kapal angkutan penumpang di Pelabuhan Sungai Durian.	❖ Kurangnya perawatan infrastruktur Pelabuhan Sungai Durian. ❖ Tidak tersedianya dana untuk pembangunan fasilitas di Pelabuhan Sungai Durian dan Dermaga asal pemberangkatan kapal angkutan barang dan penumpang di Kecamatan yang masih berpotensi menggunakan moda transportasi sungai.
10.	Tidak adanya sosialisasi tentang keselamatan ASDP	➢ Rendahnya tingkat kesadaran motoris dan masyarakat pengguna moda transportasi sungai terhadap keselamatan jiwa diri dan orang lain pada saat mengoperasikan kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan.	❖ Tidak tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap motoris kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan masyarakat pengguna moda transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
11.	Kurangnya keterpaduan pembangunan jaringan transportasi SDP dengan rencana pengembangan wilayah	➢ Pembangunan sarana dan prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang tidak sesuai dengan tata letak dan tidak berdasarkan atas kajian kebutuhan, melainkan berdasarkan atas kepentingan tertentu, sehingga banyak sarana dan prasarana ASDP yang tidak terfungsikan dan terbengkalai.	❖Tidak adanya koordinasi baik di internal maupun eksternal Dinas Perhubungan dan masih tingginya tingkat ego sektoral.
12.	Menurunya penumpang angkutan sungai, danau dan penyeberangan	➢ Angkutan penumpang umum sungai dan danau yang beralih fungsi menjadi angkutan barang.	❖Sudah terbukanya akses jalan darat hampir disemua kecamatan yang berada di Kabupaten Sintang, sehingga masyarakat banyak yang menggunakan moda transportasi darat dengan kendaraan pribadi, dan cost yang dikeluarkan

			lebih kecil dibandingkan menggunakan moda transportasi sungai.
13.	Tidak Tersedianya PPNS di Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan	➢ Tidak ada penindakan pelanggaran sesuai ketentuan Undang-Undang dan hokum yang berlaku	❖ Keterbatasan anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang
14.	Terbatasnya sarana dan prasarana lalu lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan	➢ Kebutuhan Spied Patroli yang tidak memadai ➢ Operasionalk sangat terbatas	❖ Keterbatasan anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang
15.	Perubahan alur lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan	➢ Terjadinya pendangkalan sungai	❖ Maraknya aktipitas penambangan emas tanpa ijin (PETI) ❖ Kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih rendah
16.	Masih banyak kendaraan yang belum melakukan UJI KIR Kendaraan bermotor	➢ Aplikasi sering terjadi error ➢ Pengelolaan Aplikasi tersentral di Pusat	❖Kurangnya kesaran masyarakat untuk melaksanakan uji KIR .
17.	Amburadulnya tata kelola parkir	➢ Tumpang tindih tempat parkir	❖Lokasi Parkir jalan berhimpitan dengan halaman ruko yang menjadi kewenangan pajak parkir

3.2. Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi Kabupaten Sintang

Perencanaan pembangunan Kabupaten Sintang dirumuskan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sintang, serta sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi. Maka berdasarkan hal tersebut, dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah telah ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Sintang 2025-2029 yang merupakan kondisi yang ingin dicapai 5 (lima) tahun ke depan. Visi pembangunan tersebut adalah :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Maju, Sejahtera, Berkualitas dan Berkelanjutan"

Penjelasan dari Visi ini sebagai berikut:

1) **Maju**, Kemajuan daerah dari sisi fisik ditunjukkan dengan ketersediaan infrastruktur dasar yang merata. Dari sisi ekonomi, kemajuan tercermin pada perkembangan ekonomi, transformasi struktur ekonomi, sektor industri dan sektor jasanya berkembang, tingkat kemakmuran meningkat yang tercermin pada peningkatan pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan PDRB per kapita. Selain itu dari sisi sosial, kemajuan diukur berdasarkan indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya berbasis IPTEKIN dan Riset yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia. Kemajuan pembangunan juga ditandai dengan peningkatan keterlibatan kaum perempuan yang diukur dengan Indeks Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender dan Ketimpangan Gender.
2) **Sejahtera,** mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat berdampak pada berkurangnya kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pembangunan antar kecamatan dan desa; meningkatnya perekonomian dan produktivitas daerah, kontribusi UMKM dan Koperasi, ketersediaan infrastruktur dasar dan ketahanan pangan. Terpenuhinya pendidikan untuk semua dan sehat sepanjang hayat.
3) Berkualitas, mengandung makna pembangunan yang dijalankan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ditopang dengan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, inovatif dan berahlak mulia. Sumberdaya manusia yang memiliki daya saing tinggi. Memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang melebihi pengeluaran (dapat menabung).
4) Berkelanjutan, Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan senantiasa mengedepankan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari guna terselenggaranya tata kehidupan masyarakat dengan prinsip pembangunan hari ini dilaksanakan dengan tetap memikirkan kehidupan generasi yang akan datang.

3.2.2. Misi Kabupaten Sintang

Dalam Upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 tersebut , maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas Antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang.
2) Mewujudkan Pemerataan Ekonomi Melalui Kemudahan Investasi, Pengembangan Produk Lokal, Pengendalian Inflasi, Stabilitas Ketersediaan Pangan serta Optimalisasi Pendapatan Daerah
3) Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang sinergis
4) Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana Melalui Peningkatan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Menuju Ekonomi Hijau.

3.2.3. Program Pembangunan Kabupaten Sintang

Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 telah menetapkan visi dan misi untuk menuntun arah pembangunan kearah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan, untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Sintang maka Dinas Perhubungan melaksanakan misi kesatu yaitu **"Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas Antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang".**

Misi kesatu ini diterjemahkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas merupakan salah satu cara untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang maju yaitu suatu keadaan dimana kebutuhan masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Secara Umum Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memuat keseluruhan kebijkan publik dilingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan dengan restrukturisasi dan reformasi program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan Renstra tersebut ditetapkanlah Visi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Yaitu :

"Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Perhubungan Yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah"

Penjelasan Visi ini adalah :

a. Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
b. Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang professional, mandiri dan produktif.
c. Pelayanan transportasi yang memberikan nilai tambah, diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang

kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan Misi Kementerian Perhubungan yaitu :

1. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan.
2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi dibidang sarana dan prasarana perhubungan.
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah.

Berdasarkan pada Rencana Pembagunan Jangka Panjang Nasional , diarahka pada

" ***Terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembagunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif".***

Maka fokus pembagunan sektor perhubungan /transportasi yang menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembagunan transportasi sebagai berikut :

1. Peningkatan aksesibilitas antar wilyah untuk mencapai pemeratan ekonomi.
2. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah.
3. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan
4. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Sesuai rumusan sasaran nasional pembagunan sektor transportasi menjabarkan misi Kementerian Perhubungan, maka sasaran strategis pembagunan sektor perhubungan adalah :

1. Terwujudnya Konektivitas dan Aksebilitas Nasional.
2. Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Perhubungan.
3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
4. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Perhubungan.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat, maka telaahan terhadap Visi dan Misi Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat ditunjukkan melalui Pernyataan Visi yaitu :

"Mewujudkan Pelayanan Jasa Transportasi yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman dan harga yang wajar"

Pernyataan Visi tersebut dirumuskan kedalam misi Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

a. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana transportasi dengan melibatkan pihak lain .
b. Membuka keterisolasian daerah pedalaman dan daerah terpencil
c. Memberdayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan jasa transportasi, komunikasi dan informatika.
d. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu, kreatif dan produktif.
e. Memperluas penyebaran produk sektor unggulan dan sektor lain di Propinsi Kalimantan Barat.
f. Mewujudkan masyarakat pengguna jasa transportasi yang berdisiplin.

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang yaitu :

1. Meningkatkan sarana dan sarana transportasi.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang perhubungan.
3. Meningkatkan SDM di bidang Perhubungan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana struktur tata ruang Kabupaten Sintang disusun dengan mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi, serta dilengkapi dengan konsep sistem pusat kegiatan untuk Kabupaten Sintang. Pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Sintang merupakan simul pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas:

1. PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) terdapat di desa Jasa kecamatan Ketungau Hulu yang merupakan kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia.
2. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) terdapat di kota Sintang yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan kabupaten sekitar. PKW adalah kota/kecamatan yang mempunyai tingkat perkembangan lebih tinggi dan diprioritaskan untuk dikembangkan sebagai pusat pelayanan tingkat kabupaten dan beberapa kabupaten sekitarnya.
3. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) terdapat di Nanga merakai, Nanga Sepauk dan Nanga Serawai. Penetapan PKL didasari oleh pertimbangan perlunya pusat-pusat permukiman yang tersebar secara proporsional di dalam ruang.

   PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) terdapat di 10 ibukota kecamatan lainnya yaitu Senaning, Nanga Ketungau,
4. Binjai, Nanga Tempunak, Sungai Ukoi, Nanga Dedai, Kebong, Nanga mau, Nanga Tebidah dan nanga Kemangai. PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Rencana pengembangan sistem transportasi Kabupaten Sintang secara umum terdiri dari tiga aspek yaitu rencana penetapan fungsi jaringan transportasi, rencana pembangunan prasarana transportasi, dan rencana pengembangan sistem angkutan umum. Pengembangan sistem transportasi ini terutama sistem transportasi darat memiliki fungsi ganda yaitu untuk melayani perkembangan kota yang terjadi saat ini dan merangsang perkembangan kota kearah yang diinginkan dalam rencana peruntukan lahan.

Dalam konteks regional, pengembangan sistem transportasi diarahkan dengan fungsi yang telah ditetapkan baik sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kecamatan, sebagai pusat pengumpulan dan distribusi barang dari dan ke wilayah kecamatan maupun sebagai pusat komunikasi. Sedangkan dalam konteks internal kota, pengembangan sistem transportasi kota diarahkan untuk mencegah dan menanggulangi kemungkinan terjadinya kesemerawutan lalu lintas akibat bercampurnya lalu lintas regional dan lalu lintas lokal, melalui pengaturan sistem sirkulasi dan pengaturan fungsi hirarkis jaringan transportasinya. Hal ini penting dilakukan mengingat system

transportasi memiliki pengaruh yang besar dalam tingkat efektifitas dan efisiensi interaksi kegiatan-kegiatan kota.

Disamping itu, pengembangan sistem transportasi juga diarahkan pada pembentukan suatu sistem pergerakan lokal dan regional yang serasi dan terpadu dalam satu sistem transportasi darat dan sungai..

Rencana pengembangan sistem transportasi darat terutama dirahkan pada hal-hal berikut:

1. Penentuan fungsi hirarkis sistem jaringan jalan.
2. Peingkatan fungsi jalan yang sudah ada sesuai dengan fungsi yang ditetapkan kembali untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian desain teknis badan jalan sesuai fungsinya.
3. Pembangunan jalan-jalan baru dan jembatan sesuai dengan pola peruntukan lahan.
4. Peningkatan dan pengembangan fungsi sarana dan prasarana transportasi yang meliputi termnal dan moda angkutan umum.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, salah satu tujuan diselenggarakannya transportasi jalan adalah untuk terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Dalam pengembangan jaringan pelayanan di

dalam Kabupaten Sintang ini untuk mendukung pembangunan simpul-simpul baru seperti bandar udara di kecamatan Tebelian, pengembangan

terminal angkutan penumpang dimasing-masing kecamatan, perlu dikembangkan suatu pelayanan angkutan yang saling terkoneksi antar simpul tersebut dengan jenis moda berupa bus besar, sedang dan mobil angkutan penumpang.

Dalam penataan angkutan umum pedesaan kabupaten Sintang perlu diketahui koridor-koridor kantong penumpang untuk melihat permintaan yang ada serta melihat rencana sistem perkotaan di masing-masing kecamatan karen aperlu adanya konektivitas antara pusat kota Sintang dengan beberapa wilayah kecamatan di kabupaten Sintang untuk mendukung aksesibilitas dan mobilisasi yang digunakan oleh penduduk. Yang perlu dilakukan adalah penyediaan angkutan umum bagi daerah PPK dan PPL.

Kemudian juga akan dikembangkan model pelayanan yang terjadwal dan melakukan peremajaan terhadap angkutan umum pedesaan. Pengembangan jaringan prasarana dilakukan dengan:

1. Optimalisasi terminal tipe B yaitu terminal Sungai Durian untuk mewujudkan lalu lintas yang lancar, aman, nyaman, tertib, selamat dan berwawasan lingkungan. Optimalisasi tersebut dilakukan dengan membuat jalur keberangkatan dan kedatangan, mengatur sirkulasi arus kendaraan masuk dan keluar, memperbaiki fasilitas tempat tunggu penumpang dan memasang rambu-rambu dan papan informasi yang memuat jurusan, tarif dan jadwal perjalanan.
2. Optimalisasi terminal tipe C yaitu terminal Tanjungpuri. Terminal ini melayani angkutan perkotaan dan perdesaan. Optimalisasi yang dapat dilakukan adalah memperbaiki kondisi terminal, membuat jalur keberangkatan dan kedatangan, mengatur sirkulasi arus kendaraan masuk dan keluar, membuat fasilitas parkir dan memasang rambu-rambu dan papan informasi yang memuat jurusan, tarif dan jadwal perjalanan.

Berdasarkan kondisi wilayah, potensi dan kepentingan wilayah, maka sistem prasarana yang perlu dikembangkan adalah sarana prasarana darat dan sungai.

Karena wilayah Kabupaten Sintang terdapat banyak sungai yang dapat dilayari antara lain sungai Kapuas, sungai Melawi dan sungai Ketungau

sehingga transportasi sungai ini mempunyai peran yang cukup besar dalam sistem transpotasi di Kabupaten Sintang.pengembangan transportasi sungai terutama dilakukan terhadap wilayah-wilayah yang belum dapat dilalui oleh jalan darat. Sehubungan dengan itu, arah pengembangannya adalah pengembangan armada yang mempunyai kemampuan dan kapasitas yang cukup baik dan pengamanan kawasan sepanjang sungai dari pangkalan dan buangan ranting kayu.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Sintang di masa mendatang. Analisis isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika yang berkembang. Isu-isu strategis ini, dianalisa dan dituangkan dalam isu-isu strategis yang merupakan faktor eksternal dijabarkan kedalam Peluang dan Tantangan, sedangkan faktor internal akan dituangkan sebagai Kekuatan dan Kelemahan. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penetuan isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang sebagai berikut :

Tabel 3.2
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Dinas Perhubungan	Permasalahan Dinas Perhubungan	ISU KLHS yang relevan dengan Dinas Perhubungan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Dinas Perhubungan			Isu Strategis Dinas perhubungan
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
➢ Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan angkutan barang diterminal dan di dermaga sungai., ➢ Dengan konektivitas transportasi darat dan Sungai, aktivitas perdagangan antar daerah jadi lebih lancar. Sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi ➢ Infrastruktur jalan yang memungkinkan meningkatkan Mobilitas Barang dan Orang yang Tinggi sehingga distribusi barang dan pergerakan manusia yang cepat dan efisien.	➢ Sarana dan Prasarana perhubungan untuk mendukung terwujudnya tujuan dalam rencana tata ruang masih belum optimal ➢ Sarana dan prasarana penunjang Transportasi lalu lintas baik sungai maupun transportasi lalu lintas darat belum memadai ➢ Jumlah angkutan umum di kota Sintabng semakin berkurang karena kurangnya minat pengguna angkutan dan menjamujrnya kendaraan pribadi ➢ Lemahnya data base berkaitan dengan kebutuhan dan data mengenai kondisi fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu, marka dan guardrail serta fasilitas lain seperti Traffic light dan CCTV. ➢ Personil/SDM yang belum memiliki kompentensi khusus Oleh	➢ Kecelakaan lalu lintas , yang salah satu faktornya adalah kondisi jalan yang rusak ➢ Rendahnya pelayanan angkutan umum karena kondisi dan kinerja angkutan umum massal yang belum memenuhi harapan masyarakat banyak pengguna jasa transportasi ➢ Belum terdapat sistem transportasi barang dengan jaringan yang sesuai dengan pola distribusi angkutan barang, salah satu faktor yang mrempengaruhi adalah belum adanya terminal angkutan barang khusus yang akan menjadi sentra distribusi barang ➢ Masih belum lengkapnya standar perlengkapan jalan seperti marka, dan rambu dikarenakan keterbatasan anggaran ➢ Masih maraknya praktik parkir liar dibeberapa	➢ Pencemaran Udara akibat emiksi gas dari kendaraan bermotor ➢ Infrastruktur jalan rusak akibat cuaca ekstrem dan banjir ➢ Pencemaran air dari limbah air raksa penambangan Emas tanpa ijin (PETI) dikarenakan maraknya aktipitas penambangan emas tanpa ijin (peti) ➢ Kurangnya standar keselamatan untuk jalur sungai, danau dan penyeberangan ➢ Meningkatnya	➢ Kurang baiknya penataan limbah sampah dan belum memenuhi standar emisi gas dari kendaraan bermotor ➢ Tingginya penggunaan motor dan mobil pribadi, rendahnya penggunaan transportasi umum. ➢ Korban jiwa dan kerusakan sosial akibat kecelakaan masih tinggi ➢ Banyak armada penyeberangan belum laik operasi. ➢ Pelabuhan dan dermaga kecil minim fasilitas keselamatan. ➢ Banyak jalur	➢ Belum efektifnya penanganan sampah dan belum adanya sanksi terhadap kendaraan yang melanggar emisi gas buang ➢ Kurangnya sarana transportasi umum mendorong penggunaan kendaraan pribadi. ➢ Wilayah pedalaman sangat bergantung pada sungai/danau untuk logistik dan mobilitas. ➢ Tidak semua daerah punya kapasitas SDM dan anggaran untuk mengelola perhubungan air secara maksimal. ➢ Sistem informasi rute, cuaca, dan keselamatan masih minim di daerah,	➢ Penguatan Pengujian kendaraan bermotor ➢ Masih banyak jalan nasional, provinsi, dan kabupaten yang rusak atau belum memenuhi standar. ➢ Minimnya jalan alternatif sehingga menyebabkan kemacetan di jalur utama pada jam jam tertentu. ➢ Pertumbuhan kendaraan pribadi yang pesat tidak diimbangi dengan pengembangan transportasi umum yang memadai. ➢ Masih kurangnya fasilitas keselamatan seperti rambu-rambu, penerangan jalan, dan fasilitas penyeberangan yang layak. ➢ Terjadinya aktivitas

	karena itu perlu dilakukan peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui diklat-diklat atau pendidikan formal. ➢ Masih kurangnya penataan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perhubungan yang sudah terseduia untuk menggali potensi Pendapatan daerah ➢ Kurang Optimalnya pengawasan dan sosialisasi/ pembinaan kepada masyarakat berkenaan dengan standar keselamatan , peraturan lalu lintas, terminal dan perparkiran. ➢ Keterbatasan anggaran pada dinas Perhubungan , sehingga memerlukan penyediaan dana yang memadai baik dari APBD maupun APBN sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.	ruas jalan yang bukan peruntukkannya ➢ Pemerintah Kabupaten Sintang perlu menyiapkan sarana dan prasarana Dermaga ➢ Pengembangan terminal tipe C dan terminal internasional untuk mendukung transportasi di dalam kota dan antar Negara di wilayah perbatasan ➢ Pemenuhan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung fasilitas keselamatan untuk arus orang dan barang ➢ Perlunya peningkatan akses transportasi serta kualitas angkutan umum di daerah kecamatan yang jauh jaraknya dari daerah ibukota Kabupatren Sintang seperti Kecamatan Ambalau, Serawai, Kayan Hulu serta Ketungau Hulu	frekuensi badai, banjir, dan kekeringan yang berdampak langsung pada jalur sungai dan danau, sehingga Mengganggu operasional penyeberangan, terutama di wilayah yang sangat bergantung pada transportasi air.	penyeberangan liar tanpa izin resmi dikarenakan Minimnya sanksi hukum serta pengawasan dari dinas terkait. ➢ Belum semua aktivitas transportasi air memperhatikan dampak lingkungan (KLHS belum merata). ➢ Transportasi air jadi satu-satunya akses di beberapa wilayah Kecamatan	menyulitkan pengambilan keputusan cepat.	bongkar muat diluar pelabuhan ➢ Operator kapal banyak yang belum memiliki dokumen kapal dikarenakan tidak ada petugas ASN Balai pengelola transportasi Darat Kelas II Propinsi kalbar yang ditempatkan di Kabupaten Sintang , sehingga terhambatnya proses penerbitan dokumen. ➢ Masih banyak wilayah yang belum terlayani atau minim akses transportasi. ➢ Keterbatasan anggaran pemerintah untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan transportasi umum.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan suatu yang ingin dicapai selama periode 2025-2029, dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sehingga rumusannya harus dapat menggambarkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang, sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang merupakan permasalahan pokok bidang perhubungan yang ada di Kabupaten Sintang yang menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan dalam bidang perhubungan .

Untuk mencapai visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Sintang periode 2025-2029, Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang mengemban/melaksanakan Misi ke 1(Satu) yaitu: " ***Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang"*** adalah bagaimana upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang berupaya memberikan pelayanan berupa peningkatan Fasilitas sarana dan prasarana dibidang perhubungan guna meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kualitas transportasi di Kabupaten Sintang . Untuk mewujudkan Misi dan Misi Kabupaten Sintang yang di Muat dalam Rancangan RPJMD Kabupaten sintang Tahun 2025-2029 maka konsep Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tujuan merupakan suatu yang ingin dicapai selama periode 2025-2029, dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sehingga rumusannya harus dapat menggambarkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang, sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur,

dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang merupakan permasalahan pokok bidang perhubungan yang ada di Kabupaten Sintang yang menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan dalam bidang perhubungan .

Untuk mencapai visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Sintang periode 2025-2029, Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang mengemban/melaksanakan Misi ke 1(Satu) yaitu: " ***Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang"*** adalah bagaimana upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang berupaya memberikan pelayanan berupa peningkatan Fasilitas sarana dan prasarana dibidang perhubungan guna meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kualitas transportasi di Kabupaten Sintang .

Adapun sasaran pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang tahun 2025–2029 sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan prioritas dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Sintang Periode 2025-2029 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
KONSEP RENCANA STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

MISI	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas antar wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang	Meningkatnya Konektivitas aksesibilitas transportasi terhadap keselamatan dan keamanan transportasi	Meningkatkan standar keamanan dan keselamatan bertransportasi	1	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan dan sungai	1	Peningkatan pengawasan jalur sungai
					2	Peningkatan pemeliharaan pelabuhan sungai dan dermaga
					3	Peningkatan pengawasan jalur darat
					4	Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan perhubungan
					5	Peningkatan pemeliharaan fasilitas perhubungan
					6	Mengembangkan sisten transportasi sungai yang terintegrasi dengan transpoprtasi darat
			2	Pengembangan Sistem manajemen pelayanan perhubungan	1	Pengembangan aplikasi pengujian kelayakan kendaraan
					2	Peningkatan kelaikan angkutan umum
					3	Peningkatan layanan transportasi umum

Adapun sasaran pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang tahun 2025–2029 sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan prioritas dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Sintang Periode 2025-2029 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Rentra
Dinas Perhubungan kabupatren Sintang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(6)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Konektivitas aksebilitas transportasi terhadap keselamatan dan keamanan transportasi	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan terhadap keselamatan dan keamanan transportasi	Meningkatkan standar keamanan dan keselamatan bertransportasi	Konektivitas Darat	0,22	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,28	
			Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	0	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	
			Konektivitas Laut (Sungai, Danau dan Penyeberangan)	0.52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus dan penentuan program/kegiatan/sub kedgiatan dalam menghadapi lingkungan.

Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan diarahkan pada kebijakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.

Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Pentahapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Pentahapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan
Kabupaten Sintang

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perencanaan dan identifikasi wilayah potensial	Pengembangan dan pembangunan infrastruktur	Pengoperasian dan integrasi transportasi	Monitoring, evaluasi dan pemeliharaan	Peningkatan, Digitalisasi dan modernisasi

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan . Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sintang yang telah dimuat dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 Keselarasan arah kebijakan RPJMD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dalam lima tahun mendatang dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.2
Arah Kebijakan Rencana Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Perhubungan	Arah Kebijakan RPJMD	Keterangan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Audit trayek dan operator sesuai standar waktu dan kapasitas Pengecekan alat keselamatan kapal sesuai SOP Menyediakan anggaran dan fasilitas untuk terminal, pelabuhan dan Uji KIR Kendaraan Melakukan Pemeriksaan kelengkapan surat menyurat kendaraan serta identitas angkutan umum PKB menggunakan alat uji yang sudah dikalibrasi. Sertifikasi hasil uji tersistem secara elektronik melalui Stiker Hologram, RFID dan Blue E (Smard Card) Melakukan Pemeriksaan kelengkapan surat menyurat kendaraan serta identitas angkutan umum	1. Peningkatan pengawasan jalur sungai 2. Peningkatan pemeliharaan pelabuhan sungai dan dermaga rakyat 3. Peningkatan pengawasan jalur darat 4. Peningkatan ketersediaan fasilitras keselamatan perhubungan 5. Peningkatan pemeligharaan fasilitas perhubungan 6. Pengembangan alat pengujian kelayakan kendaraan 7. Peningkatan kelaikan angkutan barang dan orang 8. Peningkatan layanan transportasi umum	1. Meningkatkan kualitas jalan Strategis penghubung antar kecamatan dan kawasan perbatasan. 2 Mengembangkan sistem transportasi sungai yang terintegrasi dengan transportasi darat. 3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan transportasi udara.	

BAB VI
RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Upaya Mewujudkan Program-program kerja yang akan dilaksanakan , maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang telah menyusun rencana strategis yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun ternik perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Strategis sebagai Tabel 4.1 dan rencana pendanaan untuk periode 2026-2030 sebagai mana tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 6.1

TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan terhadap keselamatan dan keamanan transportasi	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan terhadap keselamatan dan keamanan transportasi	Meningkatkan standar keamanan dan keselamatan bertransportasi	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunya Renja, Renstra	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dokumen
				Tersusunnya RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	- koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
				Tersusunnya LKjIP SKPD	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja SKPD	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yasng menerima gaji dan Tunjangan	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang
				Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen
				Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan
				Tersedianya Laporan prognosis SKPD	Jumlah Laporan prognosis SKPD	- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen
						Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengamanan barang milik daerah	Jumlah Dokumen pengamanan barang milik daerah	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang milik daerah pada SKPD	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang milik daerah pada SKPD	Laporan
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan

						Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
				Tersedianya laporan Pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan Pengelolaan retribusi daerah	-	Pelaporan Pengelolaan retribusi daerah	Dokumen
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
				Tersedianya pakaian dinas dan atribut	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut	-	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				Tersedianya Alat-alat listrik, lampu , Kabel Listrik, top Kontak dan lain-lain	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Paket
				Tersedianya ATK dan lain-lain di Sekretariat	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Paket
				Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Jumlah paket peralatan kebersihan kantor	-	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Paket
				Tersedianya BBM Operasional, makan minum rapat dan kegiatan, Pameran dan perayaan hari besar di sekretasriat	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket
				Tersedianya Cetak, Jilid, cetak kartu , fotocopy dan lain-lain di Sekretariat	Jumnlah paket barang Cetak, Jilid, cetak kartu , fotocopy dan lain-lain di Sekretariat	-	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Paket
				Tersedianya majalah/koran dan buku buku peraturan	Jumlah majalah/koran dan buku buku peraturan	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen
				Terlaksananya Rapat, koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah, propinsi, Keluar daerah Kabupaten dan Dalam daerah kabupaten	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat, koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah, propinsi, Keluar daerah Kabupaten dan Dalam daerah kabupaten	-	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
				Tersedianya Bahan pameran, pawai dan lain-lain	Jumlah paket Bahan pameran, pawai dan lain-lain	-	Penyediaan Bahan/Material	Paket
						Kegiatan Pengadaan barang Milik daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah		
				Tersedianya Kendaraan Roda empat dan Roda Dua Perorangan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan yang disediakan	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan	Unit

				Tersediannyan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang disediakan	_	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Unit
				Tersediannya Meja, kursi dan lemari kantor	Jumlah paket mebel yang disediakan	_	Pengadaan Mebel	Unit
				Tersediannya Laptop, PC, Printer, Server dan lain-laim	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	_	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit
				Tersediannya Bangunan baru (ruang, pagar)	Jumlah Unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	_	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit
				Tersediannya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (AC)	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	_	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit
				Tersediannya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya (mesin tebas rumput, mesin listrik dll)	Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	_	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit
						Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah		
				Tersediannya Buku cek, Masterai dll	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	_	Penyediaan jasa surat menyurat	Laporan
				Tersediannya penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	_	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan
				Tersediannya jasa clening service, gaji tenaga kontrak dll	Jumlah laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	_	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah		
				Tersediannya Jasa Pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	_	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit
				Tersediannya Jasa Pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan dinas Operasinal atau lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasinal atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	_	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan dinas Operasinal atau lapangan	Unit
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit

			Meningkatnya Kualitas Penunjang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	
						Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	- Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen
				Ditetapkannya dan tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	- Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen
				Tersusunnya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	- Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen
				Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	- Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen
				Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	- Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan
						Kegiatan Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	
				Terbagunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota yang terbangun	- Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Unit
				Tersedianya Perlengkapan Jalan di jalan kab/kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di jalan kab/kota	- Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan kab/kota	Unit
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Unit
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Unit
						Kegiatan Pengelolan terminal Tipe C	
				Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	- Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Dokumen
				Terlaksananya Pengawasan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C	- Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Dokumen
				Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	- Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit
				Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah Terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	- Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit

				Tedrlaksana Pemenuhan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah kebutuhan kompentensi SDM Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi	- Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Orang
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit
						Kegiatan Penerbiktan izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
				Terlaksananya pemungutan retribusi parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin pnyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kab/Kota	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin pnyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kab/Kota	Laporan
						Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan bermotor	
				Tersedianya Sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	- Penyediaan Sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Unit
				Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang nelakukan uji KIR	- Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Unit
						Kegiatan Pelaksanaan Manejemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kab/Kota	
				Terbangunnya Rute Aman Selamat Sekolah	Jumlah kawasan pembangunan Terbangunnya Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	- Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Unit
				Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	- Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Unit
				Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota	- Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota	Laporan
				Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan	- Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dokumen
				Terlaksananya Penataan menajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kab/Kota	Jumlah Laporan Penataan menajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kab/Kota	- Penataan menajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kab/Kota	Laporan
						Kegiatan Audit dan Inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	
				Terlaksananya Inspeksi, AUDIT dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Inspeksi, AUDIT dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	- Pelaksanaan Inspeksi, AUDIT dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan
				Terlaksananya Inspeksi, AUDIT dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, AUDIT dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	- Pelaksanaan Inspeksi, AUDIT dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan
				66		**Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota**	
				Terkendalinya dan terawasinya ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu)	Jumlah Laporan Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu)	- Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang	Laporan

						Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota		
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota	-	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota	Dokumen
						Kegiatan Penerbitan Izin Penyelengagaran Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota		
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
						Kegiatan Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan		
				Tersedianya Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Jumlah Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	-	Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Unit
			Meningkatnya Kualitas Penunjang Pengelolaan Pelayaran			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**		
						Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan domisili orang peseorangan WNI atau Badan Usaha		

				Terfasilitasinya pemenuhan persyaratan perolehan izin usah penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang peseorangan WNI atau badan usaha kewenangan Kab/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin usah penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang peseorangan WNI atau badan usaha kewenangan Kab/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	-	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usah penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang peseorangan WNI atau badan usaha kewenangan Kab/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Dokumen
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang peseorangan WNI atau badan usaha kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang peseorangan WNI atau badan usaha kewenangan Kab/Kota	-	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang peseorangan WNI atau badan usaha kewenangan Kab/Kota	Laporan
						Kegiatan Pembangunan dan penerbitan Izin pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek dalam 1 daerah Kab/Kota		
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah Kab/Kota kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah Kab/Kota kewenangan Kab/Kota	-	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah Kab/Kota kewenangan Kab/Kota	Laporan
						Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah Kab/Kota yang terletak pada jaringanjalan Kab/Kota dan/atau jaringan jalur kereta api Kab/Kota dalam daerah Kab/Kota		
				Terkendalinya dan terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan

						Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau		
				Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau.	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau.	-	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau.	Dokumen
						Kegiatan Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau		
				Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.	-	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.	Dokumen
				Terlaksananya Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga sungai dan danau yang dibangun	-	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Unit
				Teroperasinya dan terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang beroperasi dan terpelihara	-	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Unit
				Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang dibangun	-	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Unit
				Terlaksananya Pemeliharaan Dermga sungai dan Danau	Jumlah Dermga sungai dan Danau yang dipelihara	-	Pemeliharaan Dermga sungai dan Danau	Unit
				Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	-	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Laporan

Tabel 6.2

RENCANA PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

BIDANG URUSAN/[ROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGETBDAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	Rp 34,241,500.00	1 Dokumen	Rp 5,000,000.00	1 Dokumen	Rp 5,000,000.00	1 Dokumen	Rp 5,000,000.00	1 Dokumen	Rp 5,000,000.00	
- koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD				1 Dokumen	Rp 4,000,000.00	1 Dokumen	Rp 4,000,000.00	1 Dokumen	Rp 4,000,000.00	1 Dokumen	Rp 4,000,000.00	
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 7,498,500.00	1 Dokumen	Rp 8,000,000.00	1 Dokumen	Rp 8,000,000.00	1 Dokumen	Rp 8,000,000.00	1 Dokumen	Rp 8,000,000.00	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah													
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yasng menerima gaji dan Tunjangan		60 Org/Bulan	Rp7,000,000,000.00	70 Org/Bulan	Rp9,800,000,000.00	80 Org/Bulan	Rp 13,720,000,000.00	90 Org/Bulan	Rp19,208,000,000.00	95 Org/Bulan	Rp 26,891,200,000.00	
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 12,402,000.00	1 Dokumen	Rp 13,642,200.00	1 Dokumen	Rp 15,006,420.00	1 Dokumen	Rp 16,507,062.00	1 Dokumen	Rp 18,157,768.20	
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKP	1 Laporan	1 Laporan	Rp 5,000,000.00	1 Laporan	Rp 5,000,000.00	1 Laporan	Rp 5,000,000.00	1 Laporan	Rp 5,000,000.00	1 Laporan	Rp 5,000,000.00	
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 4,000,000.00	1 Dokumen	Rp 4,000,000.00	1 Dokumen	Rp 4,000,000.00	1 Dokumen	Rp 4,000,000.00	1 Dokumen	Rp 4,000,000.00	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen pengamanan barang milik	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 91,331,000.00	1 Dokumen	Rp 100,000,000.00	1 Dokumen	Rp 100,000,000.00	1 Dokumen	Rp 100,000,000.00	1 Dokumen	Rp 100,000,000.00	
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang milik daerah				1 Laporan	Rp 2,000,000.00	1 Laporan	Rp 2,000,000.00	1 Laporan	Rp 2,000,000.00	1 Laporan	Rp 2,000,000.00	
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	Rp 2,000,000.00	1 Laporan	Rp 2,000,000.00	1 Laporan	Rp 2,000,000.00	1 Laporan	Rp 2,000,000.00	
Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah													
- Pelaporan Pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan Pengelolaan retribusi daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 14,662,500.00	1 Dokumen	Rp 16,128,750.00	1 Dokumen	Rp 17,741,625.00	1 Dokumen	Rp 19,515,787.50	1 Dokumen	Rp 21,467,366.25	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
- Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut				70 paket	Rp 50,000,000.00	72 paket	Rp 55,000,000.00	75 paket	Rp 60,500,000.00	75 paket	Rp 66,550,000.00	

-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10,000,000.00	1 Dokumen	Rp 11,000,000.00	1 Dokumen	Rp 12,100,000.00	1 Dokumen	Rp 13,310,000.00	1 Dokumen	Rp 14,641,000.00		
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti				4 Orang	Rp 150,000,000.00	4 Orang	Rp 150,000,000.00	4 Orang	Rp 150,000,000.00	4 Orang	Rp 150,000,000.00		
-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-				6 Orang	Rp 200,000,000.00	6 Orang	Rp 200,000,000.00	6 Orang	Rp 200,000,000.00	6 Orang	Rp 200,000,000.00		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah															
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Rp 6,346,800.00	1 Paket	Rp 6,981,480.00	1 Paket	Rp 7,679,628.00	1 Paket	Rp 8,447,590.80	1 Paket	Rp 9,292,349.88		
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 Paket	1 Paket	Rp 65,562,400.00	1 Paket	Rp 72,118,640.00	1 Paket	Rp 79,330,504.00	1 Paket	Rp 87,263,554.40	1 Paket	Rp 95,989,909.84		
-	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan kebersihan kantor	1 Paket	1 Paket	Rp 8,335,000.00	1 Paket	Rp 9,168,500.00	1 Paket	Rp 10,085,350.00	1 Paket	Rp 11,093,885.00	1 Paket	Rp 12,203,273.50		
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	Rp 36,500,000.00	1 Paket	Rp 40,150,000.00	1 Paket	Rp 44,165,000.00	1 Paket	Rp 48,581,500.00	1 Paket	Rp 53,439,650.00		
-	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumnlah paket barang Cetak, Jilid, cetak kartu , fotocopy dan lain-lain di Sekretariat	1 Paket	1 Paket	Rp 11,432,000.00	1 Paket	Rp 12,575,200.00	1 Paket	Rp 13,832,720.00	1 Paket	Rp 15,215,992.00	1 Paket	Rp 16,737,591.20		
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah majalah/koran dan buku buku peraturan				1 Dokumen	Rp 3,000,000.00	1 Dokumen	Rp 3,000,000.00	1 Dokumen	Rp 3,000,000.00	1 Dokumen	Rp 3,000,000.00		
-	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat, koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah, propinsi, Keluar daerah Kabupaten dan Dalam daerah kabupaten	99 Laporan	110 Laporan	Rp 150,037,000.00	120 Laporan	Rp 200,000,000.00	120 Laporan	Rp 200,000,000.00	201 Laporan	Rp 200,000,000.00	201 Laporan	Rp 200,000,000.00		
-	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan pameran, pawai dan				1 Paket	Rp 30,000,000.00	1 Paket	Rp 30,000,000.00	1 Paket	Rp 30,000,000.00	1 Paket	Rp 30,000,000.00		
Kegiatan Pengadaan barang Milik daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah															
-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan yang				1 Unit	Rp 50,000,000.00								
-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang disediakan				2 Unit	Rp 200,000,000.00								
-	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan				40 Unit	Rp 500,000,000.00								
-	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan				15 Unit	Rp 200,000,000.00								
-	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan								1 Unit	Rp 200,000,000.00				
-	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang	1 Paket			1 Paket	Rp 100,000,000.00	1 Paket	Rp 100,000,000.00	1 Paket	Rp 100,000,000.00	1 Paket	Rp 100,000,000.00		
-	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	15 Unit	1 Unit	Rp 18,384,000.00	3 Unit	Rp 40,000,000.00	3 Unit	Rp 44,000,000.00	4 Unit	Rp 48,400,000.00	5 Unit	Rp 53,240,000.00		
Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah															
-	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat	1 Laporan	1 Laporan	Rp 3,000,000.00	1 Laporan	Rp 3,000,000.00	1 Laporan	Rp 3,000,000.00	1 Laporan	Rp 3,300,000.00	1 Laporan	Rp 3,000,000.00		
-	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Rp1,682,224,680.00	12 Laporan	Rp1,850,447,148.00	12 Laporan	Rp 2,035,491,862.80	12 Laporan	Rp 2,239,041,049.08	12 Laporan	Rp 2,462,945,153.99		
-	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Rp 437,836,800.00	12 Laporan	Rp 481,620,480.00	12 Laporan	Rp 529,782,528.00	12 Laporan	Rp 582,760,780.80	12 Laporan	Rp 641,036,858.88		

-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10,000,000.00	1 Dokumen	Rp 11,000,000.00	1 Dokumen	Rp 12,100,000.00	1 Dokumen	Rp 13,310,000.00	1 Dokumen	Rp 14,641,000.00		
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti				4 Orang	Rp 150,000,000.00	4 Orang	Rp 150,000,000.00	4 Orang	Rp 150,000,000.00	4 Orang	Rp 150,000,000.00		
-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-				6 Orang	Rp 200,000,000.00	6 Orang	Rp 200,000,000.00	6 Orang	Rp 200,000,000.00	6 Orang	Rp 200,000,000.00		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah															
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Rp 6,346,800.00	1 Paket	Rp 6,981,480.00	1 Paket	Rp 7,679,628.00	1 Paket	Rp 8,447,590.80	1 Paket	Rp 9,292,349.88		
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 Paket	1 Paket	Rp 65,562,400.00	1 Paket	Rp 72,118,640.00	1 Paket	Rp 79,330,504.00	1 Paket	Rp 87,263,554.40	1 Paket	Rp 95,989,909.84		
-	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan kebersihan kantor	1 Paket	1 Paket	Rp 8,335,000.00	1 Paket	Rp 9,168,500.00	1 Paket	Rp 10,085,350.00	1 Paket	Rp 11,093,885.00	1 Paket	Rp 12,203,273.50		
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	Rp 36,500,000.00	1 Paket	Rp 40,150,000.00	1 Paket	Rp 44,165,000.00	1 Paket	Rp 48,581,500.00	1 Paket	Rp 53,439,650.00		
-	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumnlah paket barang Cetak, Jilid, cetak kartu , fotocopy dan lain-lain di Sekretariat	1 Paket	1 Paket	Rp 11,432,000.00	1 Paket	Rp 12,575,200.00	1 Paket	Rp 13,832,720.00	1 Paket	Rp 15,215,992.00	1 Paket	Rp 16,737,591.20		
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah majalah/koran dan buku buku peraturan				1 Dokumen	Rp 3,000,000.00	1 Dokumen	Rp 3,000,000.00	1 Dokumen	Rp 3,000,000.00	1 Dokumen	Rp 3,000,000.00		
-	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat, koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah, propinsi, Keluar daerah Kabupaten dan Dalam daerah kabupaten	99 Laporan	110 Laporan	Rp 150,037,000.00	120 Laporan	Rp 200,000,000.00	120 Laporan	Rp 200,000,000.00	201 Laporan	Rp 200,000,000.00	201 Laporan	Rp 200,000,000.00		
-	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan pameran, pawai dan				1 Paket	Rp 30,000,000.00	1 Paket	Rp 30,000,000.00	1 Paket	Rp 30,000,000.00	1 Paket	Rp 30,000,000.00		
Kegiatan Pengadaan barang Milik daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah															
-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan yang				1 Unit	Rp 50,000,000.00								
-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang disediakan				2 Unit	Rp 200,000,000.00								
-	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan				40 Unit	Rp 500,000,000.00								
-	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan				15 Unit	Rp 200,000,000.00								
-	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan								1 Unit	Rp 200,000,000.00				
-	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang	1 Paket			1 Paket	Rp 100,000,000.00	1 Paket	Rp 100,000,000.00	1 Paket	Rp 100,000,000.00	1 Paket	Rp 100,000,000.00		
-	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	15 Unit	1 Unit	Rp 18,384,000.00	3 Unit	Rp 40,000,000.00	3 Unit	Rp 44,000,000.00	4 Unit	Rp 48,400,000.00	5 Unit	Rp 53,240,000.00		
Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah															
-	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat	1 Laporan	1 Laporan	Rp 3,000,000.00	1 Laporan	Rp 3,000,000.00	1 Laporan	Rp 3,000,000.00	1 Laporan	Rp 3,300,000.00	1 Laporan	Rp 3,000,000.00		
-	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Rp1,682,224,680.00	12 Laporan	Rp1,850,447,148.00	12 Laporan	Rp 2,035,491,862.80	12 Laporan	Rp 2,239,041,049.08	12 Laporan	Rp 2,462,945,153.99		
-	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Rp 437,836,800.00	12 Laporan	Rp 481,620,480.00	12 Laporan	Rp 529,782,528.00	12 Laporan	Rp 582,760,780.80	12 Laporan	Rp 641,036,858.88		

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah													
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	Rp 40,010,000.00	1 Unit	Rp 50,000,000.00	1 Unit	Rp 50,000,000.00	1 Unit	Rp 50,000,000.00	1 Unit	Rp 50,000,000.00	
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan dinas Operasinal atau lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasinal atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	25 Unit	25 Unit	Rp 60,850,000.00	25 Unit	Rp 66,935,000.00	25 Unit	Rp 73,628,500.00	25 Unit	Rp 80,991,350.00	25 Unit	Rp 89,090,485.00	
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	22 Unit	28 Unit	Rp 18,958,800.00	29 Unit	Rp 20,854,680.00	30 Unit	Rp 22,940,148.00	31 Unit	Rp 25,234,162.80	32 Unit	Rp 27,757,579.08	
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	21 Unit	21 Unit	Rp -	21 Unit	Rp -	21 Unit	Rp -	21 Unit	Rp -	21 Unit	Rp -	
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	21 Unit	25 Unit	Rp 19,813,500.00	26 Unit	Rp 21,794,850.00	27 Unit	Rp 23,974,335.00	28 Unit	Rp 26,371,768.50	29 Unit	Rp 29,008,945.35	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													
Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota													
- Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		1 Dokumen	Rp 100,000,000.00									
- Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	Rp 15,000,000.00									
- Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	Rp 100,000,000.00									
- Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota										1 Dokumen	Rp 100,000,000.00	
- Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										1 Laporan	Rp 15,000,000.00	
Kegiatan Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota													
- Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota yang terbangun				1 Dokumen	Rp 150,000,000.00							
- Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan kab/kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di jalan kab/kota		30 Unit	Rp 70,000,000.00	31 Unit	Rp 200,000,000.00	31 Unit	Rp 200,000,000.00	31 Unit	Rp 200,000,000.00	31 Unit	Rp 200,000,000.00	150 Rambu dan Traffic Light
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara						1 Unit	Rp 25,000,000.00	1 Unit	25,000,000.00			
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	4 Unit	20 Unit	Rp 10,000,000.00	21 Unit	Rp 80,000,000.00	21 Unit	Rp 80,000,000.00	21 Unit	Rp 80,000,000.00	21 Unit	Rp 80,000,000.00	

Kegiatan Pengelolan terminal Tipe C													
- Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C				1 Dokumen	Rp 100,000,000.00							Terminal tebidah
- Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C		3 Laporan	Rp 150,000,000.00	3 Laporan	Rp 150,000,000.00	3 Laporan	Rp 150,000,000.00	3 Laporan	Rp 150,000,000.00	3 Laporan	Rp 150,000,000.00	
- Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)				1 Unit	Rp 200,000,000.00	1 Unit	Rp 200,000,000.00	1 Unit	Rp 200,000,000.00			
- Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah Terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang						1 Unit	Rp 1,500,000,000.00					Terminal tebidah
- Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah kebutuhan kompentensi SDM Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi		2 Orang	Rp 30,000,000.00	2 Orang	Rp 30,000,000.00	2 Orang	Rp 30,000,000.00	2 Orang	Rp 30,000,000.00	2 Orang	Rp 30,000,000.00	
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara		1 Unit	Rp 75,000,000.00			1 Unit	Rp 75,000,000.00			1 Unit	Rp 75,000,000.00	
Kegiatan Penerbiktan izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir													
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin pnyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin pnyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kab/Kota		1 Laporan	Rp 100,000,000.00	1 Laporan	Rp 110,000,000.00	1 Laporan	Rp 121,000,000.00	1 Laporan	Rp 133,100,000.00	1 Laporan	Rp 146,410,000.00	
Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan bermotor													
- Penyediaan Sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	3 Unit	9 Unit	Rp 100,000,000.00	9 Unit	Rp 110,000,000.00	9 Unit	Rp 121,000,000.00	9 Unit	Rp 133,100,000.00	9 Unit	Rp 146,410,000.00	
- Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang nelakukan uji KIR	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 5,000,000.00	1 Dokumen	Rp 110,000,000.00	1 Dokumen	Rp 110,000,000.00	1 Dokumen	Rp 110,000,000.00	1 Dokumen	Rp 110,000,000.00	
Kegiatan Pelaksanaan Manejemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kab/Kota													
- Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Terbangunnya Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun				1 Unit	Rp 100,000,000.00					1 Unit	Rp 100,000,000.00	Sei Durian dan Tanjung Puri
- Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZoSS)				3 Unit	Rp 300,000,000.00	3 Unit	Rp 300,000,000.00	3 Unit	Rp 300,000,000.00	3 Unit	Rp 300,000,000.00	12 sekolah di Kec. Sintang
- Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota		12 Laporan	Rp 35,000,000.00	12 Laporan	Rp 35,000,000.00	12 Laporan	Rp 35,000,000.00	12 Laporan	Rp 35,000,000.00	12 Laporan	Rp 35,000,000.00	Rapat Forum LLAJ 12 kali pertahun dan biaya honor fm
- Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan		25 Unit	Rp 50,000,000.00	25 Unit	Rp 50,000,000.00	25 Unit	Rp 50,000,000.00	25 Unit	Rp 50,000,000.00	25 Unit	Rp 50,000,000.00	
- Penataan menajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kab/Kota	Jumlah Laporan Penataan menajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kab/Kota	1 Laporan	1 Laporan	Rp 50,000,000.00	1 Laporan	Rp 50,000,000.00	1 Laporan	Rp 50,000,000.00	1 Laporan	Rp 50,000,000.00	1 Laporan	Rp 50,000,000.00	

Kegiatan Audit dan Inspeksi keselamatan LLAJ di jalan														
- Pelaksanaan Inspeksi, AUDIT dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Inspeksi, AUDIT dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	24 Laporan	24 Laporan	Rp 48,000,000.00	24 Laporan	Rp 48,000,000.00	24 Laporan	Rp 48,000,000.00	24 Laporan	Rp 48,000,000.00	24 Laporan	Rp 48,000,000.00	
- Pelaksanaan Inspeksi, AUDIT dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, AUDIT dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	24 Laporan	24 Laporan	Rp 48,000,000.00	24 Laporan	Rp 48,000,000.00	24 Laporan	Rp 48,000,000.00	24 Laporan	Rp 48,000,000.00	24 Laporan	Rp 48,000,000.00	
Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota														
- Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kab/Kota	12 laporan	12 laporan	Rp 24,000,000.00	12 laporan	Rp 24,000,000.00	12 laporan	Rp 24,000,000.00	12 laporan	Rp 24,000,000.00	12 laporan	Rp 24,000,000.00	
Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota														
- Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	Rp 100,000,000.00								
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelengagaran Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota														
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	Rp 75,000,000.00	12 Laporan	Rp 75,000,000.00	12 Laporan	Rp 75,000,000.00	12 Laporan	Rp 75,000,000.00	12 Laporan	Rp 75,000,000.00	
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	Rp 75,000,000.00	12 Laporan	Rp 75,000,000.00	12 Laporan	Rp 75,000,000.00	12 Laporan	Rp 75,000,000.00	12 Laporan	Rp 75,000,000.00	
Kegiatan Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan														
- Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Jumlah Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda						1 Unit	Rp 200,000,000.00					Pengadaan Mushola

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN														
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan domisili orang peseorangan WNI atau Badan Usaha														
- Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usah penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang peseorangan WNI atau badan usaha kewenangan Kab/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin usah penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang peseorangan WNI atau badan usaha kewenangan Kab/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	25 Dokumen	25 Dokumen	Rp 30,000,000.00	25 Dokumen	Rp 30,000,000.00	28 Dokumen	Rp 30,250,000.00	5 Dokumen	Rp 40,000,000.00	35 Dokumen	Rp 40,000,000.00	
- Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang peseorangan WNI atau badan usaha kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang peseorangan WNI atau badan usaha kewenangan Kab/Kota	1 Laporan	1 Laporan	Rp 35,000,000.00	1 Laporan	Rp 35,000,000.00	1 Laporan	Rp 35,000,000.00	1 Laporan	Rp 35,000,000.00	1 Laporan	Rp 35,000,000.00	
Kegiatan Pembangunan dan penerbitan Izin pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek dalam 1 daerah Kab/Kota														
- Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah Kab/Kota kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah Kab/Kota kewenangan Kab/Kota	1 Laporan	1 Laporan	Rp 50,000,000.00	1 Laporan	Rp 50,000,000.00	1 Laporan	Rp 50,000,000.00	1 Laporan	Rp 50,000,000.00	1 Laporan	Rp 50,000,000.00	
Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah Kab/Kota yang terletak pada jaringanjalan Kab/Kota dan/atau jaringan jalur kereta api Kab/Kota dalam daerah Kab/Kota														
- Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	Rp 50,000,000.00	1 Laporan	Rp 50,000,000.00	1 Laporan	Rp 50,000,000.00	1 Laporan	Rp 50,000,000.00	1 Laporan	Rp 50,000,000.00	
Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau														
- Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau.	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau.		1 Dokumen	Rp 500,000,000.00										

Kegiatan Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau														
-	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 47,000,000.00	1 Dokumen	Rp 47,000,000.00	1 Dokumen	Rp 47,000,000.00	1 Dokumen	Rp 47,000,000.00	1 Dokumen	Rp 47,000,000.00	
-	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga sungai dan danau yang dibangun		1 Unit	Rp5,000,000,000.00									Pembagunan Trestle
-	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang beroperasi dan terpelihara		2 Unit	Rp 100,000,000.00									
-	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang dibangun	4 Paket	2 Paket	Rp 200,000,000.00									
-	Pemeliharaan Dermga sungai dan Danau	Jumlah Dermga sungai dan Danau yang dipelihara		5 Unit	Rp 200,000,000.00									
-	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1 Lzporan	1 Laporan	Rp 100,000,000.00	1 Laporan	Rp 100,000,000.00	1 Laporan	Rp 100,000,000.00	1 Laporan	Rp 100,000,000.00	1 Laporan	Rp 100,000,000.00	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

Untuk penentuan target beherhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas perhubungan Kabupaten Sintang dalam rangka mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 yang merupakan suatu keselarasan rencana pembangunan sesuai kurun waktu yang telah ditetapkan melalui penentuan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) .

Penetapan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja indikator program (out come) setiap tahunnya dan pencapaian pada akhir tahun Renstra.

Indikator Kinerja merupakan kunci agar pelaksanaan kegiatan yang ada dapat dilaksanakan tepat sasaran, serta dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 terkait dengan RPJMD Kabupaten Sintaang periode 2025-2029, yang mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Konektivitas Darat	%	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	
2.	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	0	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	
3.	Konektivitas Laut (Sungai, Danau dan Penyeberangan)	%	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang digunakan untuk menilai kinerja dari setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagai proses dari perencanaan dan penganggaran. IKK juga merupakan alat sebagai pencapaian IKU jika kegiatan yang diukur dengan IKK berhasil, maka target strategis IKU lebih mudah tercapai. Oleh karena itu IKK dapat dilakukan sebagai alat untuk memantau apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana , baik dari segi output, waktu, dan anggaran, dengan IKK yang jelas alokasi anggaran bisa lebih akurat dan fokus.

Berikut IKK Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 sebagai mana tabel dibawah ini :

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Jumlah arus penumpang angkutan Darat	Orang	51.529	55.000	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
2.	Jumlah arus penumpang angkutan Sungai, danau dan penyeberangan	Orang	7.870	278.040	278.040	278.040	278.040	278.040	278.040	
3.	Jumlah trayek Angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang beroperasi dan memiliki izin	Trayek	13	25	25	25	25	25	25	
4.	Jumlah trayek Angkutan Darat yang beroperasi dan memiliki izin	Trayek	17	18	18	18	18	18	18	
5.	Jumlah Angkutan Barang melalui Terminal	Ton	26.180	28.180	30.180	32.180	34.180	36.180	38.180	
5.	Jumlah Angkutan Barang melalui Dermaga	Ton	250	255,5	288	323,5	358	392	427	
6.	Jumlah Pemasangan rambu-rambu lalu lintas	Unit	0	333	333	333	333	333	334	
7	Jumlah krendaraan yang melakukan Uji KIR	Unit	1.596	1.646	1.696	1.746	1.796	1.846	1.896	
8	Jumlah Armada kapal yang beroperasi	Kapal	55	60	64	67	82	82	85	
9	Jumnlah angkutan Umum yang beroperasi	Unit	36	38	39	40	41	42	43	
10	Jumlah Dermaga Apung di Pelabuhan Sungai Durian	Unit	3 Unit	5	5	5	5	5	5	

BAB VIII
PENUTUP

Perencanaan Strategis yang merupakan suatu proses yang mengarahkan para pemimpin SKPD dalam mengembangkan Visi merupakan acuan dasar untuk mengembangkan program, kegiatan dan kebijakan. Dengan demikian, perencanaan strategis bagi Dinas Perhubungan merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Dinas Perhubungan.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang menerapkan manajemen Strategik sebagai langkah awal dalam menentukan strategi kedepan tentang apa yang akan dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya serta evaluasi, untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang memiliki Misi, Visi, Tujuan dan Sasaran yang dapat memudahkan bagi setiap orang untuk membaca, memahami dan mengerti apa yang di inginkan dan akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.

Dalam perjalanan waktu serta perkembangan dan perubahan kondisi baik ekonomi, sosial maupun perubahan kebijakan Pusat dan Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang tentunya akan melakukan perubahan dan penyesuaian. Untuk itu, masukan dan saran tentunya sangat kami harapkan untuk menjadikan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang yang lebih baik.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SINTANG

Ir. ELISA GULTOM, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661103 199503 1 003